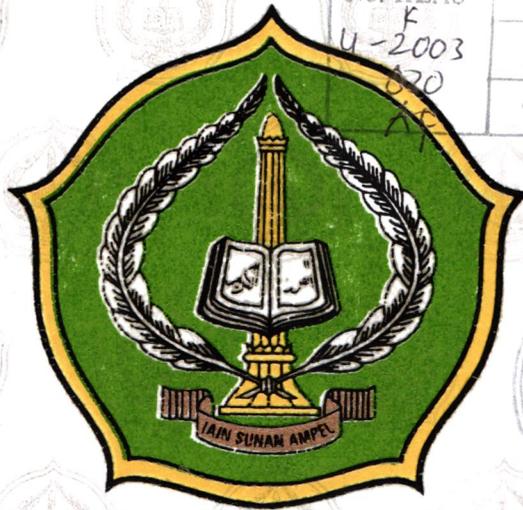


**ASPIRASI POLITIK UMAT ISLAM**  
(Studi Komperatif Antara Peran dan Kedudukan Politik  
Umat Islam Masa Orde Baru dan Reformasi)

**SKRIPSI**

PERPUSTAKAAN	
IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA	
No. KLAS K U-2003 070	No. FID : U/2003/AF/1020
ASAL BUKU :	
TANGGAL :	



*politik Islam*



Oleh :

**RIDUWAN AL-DAWAM**  
**NIM: EO.13.98.014**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA**  
**FAKULTAS USHULUDDIN**  
**JURUSAN AQIDAH DAN FILSAFAT**

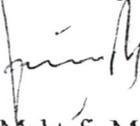
**2003**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Ridwan Al-Dawam ini telah diperiksa  
dan di setujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 14, Juli 2003

Pembimbing



Drs. H. Muktafi. M. Ag.  
NIP. 150 267 241

**PENGESAHAN TIM PENGUJI**

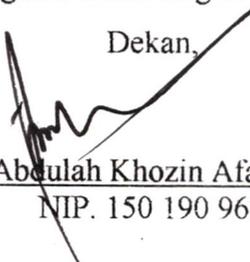
Surabaya, 18 Agustus 2003

Mengesahkan

Fakultas Ushuluddin

Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



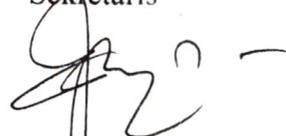
DR. Abdulah Khozin Afandi. MA.  
NIP. 150 190 962

Ketua



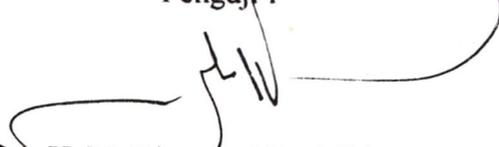
Drs. H. Muktafi, M. Ag.  
NIP. 150 267 241

Sekretaris



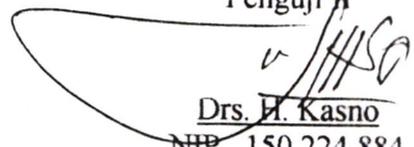
Abdul Cholik M. Ag  
Nip. 150 205 949

Penguji I



DR. H. M. Diamaluddin Miri, MAg  
NIP. 150 231 825

Penguji II



Drs. H. Kasno  
NIP. 150 224 884

## ABSTRAK

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Hasil kajian menyimpulkan bahwa bangsa Indonesia yang mayoritas penduduknya memeluk agama Islam dalam kehidupan politik tidak pernah lepas dari agama Islam, mulai Islam datang pertama kali di Indonesia pada masa kemerdekaan hingga Era Reformasi. Politik Islam Indonesia yang diwujudkan melalui partai-partai politik Islam, baik secara formalis maupun subtansif yang mempunyai tujuan yang sama yaitu mewujudkan cita-cita politik Islam dalam kehidupan politik bangsa Indonesia, Untuk mewujudkan *baladun thoyyibatun warobbun ghofur* dengan cara *amal ma'ruf nahi munkar*. Akan tetapi partai-partai Islam kurang mendapat respon dari umat Islam itu sendiri. Terbukti pada masa Orde Baru partai politik Islam mengalami kekalahan, karena dipersempit ruang gerak perpolitikannya, dan dilanjutkannya Era Reformasi partai-partai Islam juga mengalami kekalahan. Karena pada Era Reformasi partai Islam sangat banyak dan pemilihnya dibingungkan dengan partai-partai Islam. Hal ini menggambarkan simbol atau label agama kurang diterima dan dimengerti oleh masyarakat Indonesia dalam kehidupan politik.

Adanya fenomena itu mengakibatkan aspirasi umat Islam dan elite Islam kurang mencerminkan agama dalam berpolitik, seperti keadilan, toleransi dan musyawarah, sehingga tidak jarang partai politik Islam memahami agama dalam kehidupan politik sebatas ibadah ritual dan formalistik. Sehingga banyak ditemui bila agama sering digunakan untuk melegimitasi tindakan politik oleh massa maupun elite partai politik Islam, yang tak jarang mengakibatkan terjadinya konflik dengan dalil agama.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

## DAFTAR ISI

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Persetujuan pembimbing .....	i
Pengesahan .....	ii
Abstrak .....	iii
Kata Pengantar .....	iv
Daftar isi .....	v
<b>BAB I : PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Penegasan Judul .....	7
D. Alasan Memilih Judul .....	7
E. Tujuan Penulisan .....	8
F. Kajian pustaka .....	8
G. Metode dan Sistematika Pembahasan .....	9
<b>BAB II : PARTAI POLITIK ISLAM DALAM KONSTALASI POLITIK</b>	
<b>ORDE BARU .....</b>	<b>14</b>
A. Sekilas Tentang Orde Baru .....	14
B. Sikap Umat Islam Terhadap Kebijakan Orde Baru .....	16
C. Peleburan Partai Politik Islam .....	22
D. PPP dan Aspirasi Umat Islam .....	26
E. Penerimaan Pancasila Sebagai Sartu-satunya Asas PPP dan Implikasinya .....	29

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

**BAB III : PARTAI ISLAM DALAM KONSTALASI POLITIK**

**ERA REFORMASI**

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id 34

A. Liberalisasi Politik Era Reformasi ..... 34

B. Partai Islam Era Reformasi ..... 40

C. Aspirasi Politik Islam ..... 49

**BAB IV : KOMPARASI PERAN DAN KEDUDUKAN PARTAI**

**ISLAM ORDE BARU DAN ERA REFORMASI** ..... 54

A. Peran dan Kedudukan Partai Islam Masa Orde Baru ..... 54

B. Peran dan Kedudukan Partai Islam Era Reformasi ..... 59

C. Komparasi Peran dan Kedudukan Partai Islam Orde Baru  
dan Era Reformasi ..... 64

**BAB V : PENUTUP** ..... 68

A. Kesimpulan ..... 68

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

B. Saran-saran ..... 69

Daftar Pustaka

## BAB I

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

### PENDAHULUAN

#### A. LATAR BELAKANG

Sungguh tidak mudah membicarakan peranan agama Islam dalam kancah politik di Indonesia. Hal ini disebabkan karena unsure-unsur politik kita banyak diwarnai dan diperkaya oleh istilah SARA (suku, ras, agama, dan antar golongan), sementara agama menempati peran yang paling peka diantara unsur lainnya. Namun tidak menutup kemungkinan, bahwa pembahasan agama dan kontribusinya terhadap negara adalah hal yang diciptakan, sejauh pembahasan tersebut tidak mengganggu stabilitas perpolitikan.

Di Indonesia, gejala demikian tampak dalam setiap babakan sejarah, mulai permulaan abad ke 20, ketika nasionalisme Indonesia mulai terbentuk sampai saat ini, yakni terjadi pergumulan antara islam dan negara. Hubungan antara islam dan negara mengalami pasang surut. Fenomena ini dirangkum oleh Deliar Noer dalam tulisannya yang berbunyi “ Dalam sejarahnya, kedudukan dan peranan politik islam di Indodesia mengalami pasang surut”. Dan barang kali lebih banyak pasangannya daripada surutnya. Ia pasang pada permulaan zaman-zaman, kecuali demokrasi terpimpin yang dimulai dan diakhiri dalam keadaan surut. Sedangkan



pada permulaan zaman lain (penjajahan Belanda, demokrasi parlementer dan orde baru) ia pasang kemudian surat<sup>1</sup>

Persoalan mendasar pada pemerintahan saat itu adakah bagaimana mengatasi birokrasi yang tidak bertanggung jawab dan kekuasaan otoriter warisan orde lama yang dianggap telah membawa kemerosotan yang sangat parah bagi ekonomi rakyat<sup>2</sup>. Ada dua macam krisis yang melanda pemerintah diawal orde baru. Pertama, krisis dibidang ekonomi, terjadi kemrosotan dan stagnasi.<sup>3</sup> Bahkan pada tahun 1966 laju inflasi menjapai 650%. Kedua krisis dibidang politik, terjadi ketidak stabilan karean pertentangan antar kelompok-kelompok politik dalam masyarakat.

Untuk mencari solusi dua permasalahan diatas, dibidang ekonomi, pemerintah Indonesia mengadakan sejumlah tindakan untuk mengatasi parahnya perekonomian nasional, terutama melalui pinjaman utang luar negeri. Alternatif ini dipilih, agaknya pemerintah orde baru tidak melihat cara lain untuk mengatasi kebobrokan ekonomi warisan orde lama kecuali dengan jalan pinjaman dari negara-negara barat yang secara ekonominya maju. Sementara dalam bidang politik yang mendukung pembangunan ekonomi.<sup>4</sup>

<sup>1</sup> Tebba, Sudirman, *Islam Orde Baru : Perubahan Politik dan Keagamaan*. Cet 1 – Yogyakarta, Tiara Wacana Jogja, 1993, 4.

<sup>2</sup> M. Syafi'i Anwar, *Pemikiran dan aksi Islam Indonesia, sebuah kajian politik tentang cendekiawan muslim Orde Baru*, Paramadina, Jakarta 1995, 17

<sup>3</sup> Drs. Abdul Aziz Thoba, MA. *Islam dan Negara dalam Politik Orde Baru*, Gema Insani Pres, Jakarta, 1996, 186.

<sup>4</sup> *Ibid.*, 186.

Selain langkah di atas, upaya pemerintah Orde Baru adalah menggunakan birokrasi sebagai “*Prima Mobile*” atau penggerak utama program modernisasi dan pembangunan. Untuk diupayakan langkah-langkah tersebut ke arah ekonomi,

1. Mengalihkan wewenang pemerintah ke tingkat. Birokrasi yang lebih tinggi, yakni pemusatan proses pembuatan kebijakan pemerintah.
2. membuat birokrasi efektif dan tanggap pada pemerintah pimpinan pusat.
3. memperluas wewenang pemerintah dan mengendalikan daerah-daerah.

Ketiga langkah di atas telah menciptakan birokrasi Orde Baru yang kuat dan berporos pada eratnya hubungan ABRI dan teknokrat (sipil). Tetapi hubungan yang erat antara ABRI dan teknokrat telah melebarkan fungsi birokrasi Orde Baru sebagai mesin politik (*political machine*) untuk menata kehidupan sosial politik masyarakat.<sup>6</sup>

Gagalnya rezim Orde Lama dalam membangun masyarakat membawa catatan sejarah tersendiri bagi rezim Orde Baru untuk dijadikan pengalaman agar keterbelakangan dalam segala aspek kehidupan tidak terjadi pada masa Orde Baru. Oleh karena itu salah satu alternatif yang digulirkan oleh pemerintah orde baru dalam rangka menciptakan pembangunan yang dicita-citakan adalah modernisasi.<sup>7</sup>

Harapan pemerintah saat itu, agar kebijakan (*policy*) yang digulirkan mendapat dukungan dari rakyat dan negara Barat sebagai negara donor.

<sup>5</sup> *Ibid.*, 18

<sup>6</sup> Syari’I Anwar, *Pemikiran dan Aksi* ..., 18.

<sup>7</sup> *Ibid.*, 24.

Menariknya, harapan pemerintah saat itu terwujud karena memperoleh dukungan dari ABRI dan teknokrat (sipil), bahkan kalangan intelektual modernis sekuler ikut mendukung kebijakan pemerintah tersebut.

Di lain pihak, persoalan modernisasi adalah hal baru di kalangan Islam. Mereka berkeyakinan bahwa modernisasi adalah ideologi yang secara terang-terangan berkiblat pada Barat. Proses modernisasi pembangunan yang berlangsung selama ini, disatu pihak telah mendorong peningkatan kecerdasan umat secara rata-rata dan di pihak lain timbul peranan dalam masyarakat. Perkembangan ini membawa pergeseran dan pemikiran ideologis seperti cita-cita negara (Islam) yang ideal kepada gagasan sistematis yang rasional.<sup>8</sup>

Di kalangan angkatan tua golongan modernis terutama yang pernah menjadi fungsionaris dalam kepengurusan Masyumi lebih menekankan repolitasi Islam sebagai upaya menumbuhkan kekuatan politik. Caranya adalah dengan mendesak pemerintah Orde Baru merehabilitasi Masyumi.<sup>9</sup> Sedangkan kelompok yang lebih muda yang berada di luar kepengurusan Masyumi, cenderung memperjuangkan rehabilitasi material. Artinya lebih tertarik untuk aktif berkecimpung dan berpartisipasi dalam kegiatan politik Orde Baru. Bagi mereka ini, persoalan yang terpenting adalah mempersiapkan infrastruktur kegiatan politik umat Islam serta membina struktur basis yang diperlukan untuk mendukung sistem politik yang demokratis.

---

<sup>8</sup> Tebba, Sudirman, 5.

<sup>9</sup> Syafi'i Anwar, 25.

Di lain pihak, terbentuknya wadah-wadah Islam seperti Nahdhatul Ulama (NU), Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Perti), Persatuan Syarikat Islam Indonesia (PSII) tidak lagi mencerminkan aspirasi umat Islam secara keseluruhan, namun lebih berjuang demi kelompoknya.

Memasuki pemilu pertama Orde Baru pada tahun 1971 jumlah suara yang diperoleh oleh partai Islam 29 %, dengan rincian NU 18,67 %, Parmusi 7,36 %, PSII 2,39 %, dan Perti 0,70 %. Jumlah suara ini merosot jauh jika dibandingkan dengan pemilu 1955, yang memperoleh suara keseluruhan 45,2 %.<sup>10</sup>

Memasuki pemilu kedua Orde Baru tahun 1977, partai-partai Islam melebur ke dalam satu partai yang bernama Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang mengadakan peleburan partai pada tahun 1973, dengan alasan penyederhanaan partai sehingga mampu mempermudah kampanye. Jumlah suara yang diperoleh PPP saat itu adalah 29,2% sedangkan GOLKAR 62,11% dan PDI 8,6%<sup>11</sup>.

Memasuki era 80-an, kondisi partai Islam dihadapkan pada sebuah dilema yakni tetap memilih ideologi Islam yang berarti akan kehilangan satu-satunya partai Islam, karena pemerintah akan membubarkan OKP dan PARPOL yang menggunakan azas Pancasila atau memilih ideologi Pancasila yang tentunya akan kehilangan identitas sebagai partai Islam. Pada masa ini diwarnai oleh adanya ketegangan konseptual.

<sup>10</sup> Drs. Abdul Aziz Thaba, *Islam dan Negara*..., 216.

<sup>11</sup> Abdul Munir Mulkhan, *Perubahan Perilaku politik dan Polarisasi Umat Islam 1966-1987 Dalam Perspektif Sosiologis*, - Cet. 1.- Jakarta : Rajawali, 1989, 126.

Karena dihadapkan pada kondisi yang demikian, mau tidak mau PPP harus menerima kenyataan, menerima Pancasila sebagai azas, harus pula kehilangan identitas. Lebih-lebih setelah dalam Muktamar NU ke 27 di Situbondo, NU secara terang-terangan keluar dari unsur PPP. Artinya secara organisatoris NU tidak terikat dengan partai manapun, sehingga hal ini amat memberatkan bagi PPP setelah kehilangan basis terbesarnya. Dampak dari fenomena di atas, semakin menurunnya perolehan suara PPP, baik pada pemilu 1982 dengan suara 27,78% maupun pemilu tahun 1987 dengan 15,97% suara.<sup>12</sup>

Fenomena di atas menandakan, bahwa kalau dulu (sebelum menerima Pancasila sebagai azas tunggal) PPP adalah satu-satunya wadah aspiratif umat Islam, namun setelah berlakunya azas tunggal, identitas PPP sudah tidak tampak lagi, sebab semua parpol memiliki satu azas yang sama yaitu Pancasila. Artinya semua partai harus terbuka menerima semua golongan.

## B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana aspirasi politik umat Islam pada masa Orde Baru ?
2. Bagaimana aspirasi politik umat Islam pada masa Reformasi ?
3. Bagaimana peran dan kedudukan politik umat Islam pada masa Orde Baru dan Reformasi?

---

<sup>12</sup> Abdul Munir Mul Khan, *Perubahan Perilaku Politik dan Polirisasi Umat Islam*, Rajawali Jakarta, 1998, 136.

### C. PENEGASAN ISTILAH

- Aspirasi Politik : Kehendak atau keinginan yang keras untuk mendapatkan dan sebagai cara atau kebijaksanaan untuk mencapai tujuan tertentu.<sup>13</sup>
- Umat Islam : Para penganut agama Islam atau penganut Nabi Muhammad SAW.<sup>14</sup>
- Orde Baru : Sistem (Pemerintahan dan sebagainya) peraturan (Pemerintahan) susunan angkatan, masa pemerintahan di Indonesia sejak tanggal 11 Maret 1966.<sup>15</sup>
- Reformasi : Perubahan untuk memperbaiki masalah-masalah sosial, politik atau agama yang terjadi dalam suatu masyarakat atau negara.<sup>16</sup>

### D. ALASAN MEMILIH JUDUL

1. Meski umat Islam di Indonesia sebagai kelompok mayoritas, nyatanya pada masa Orde Baru umat Islam tidak bisa maksimal menyalurkan aspirasinya secara politik. Peran-peran politiknya dilokalisir sedemikian sempit, sehingga termarginalkan secara politik maupun secara ekonomi. Atas dasar itu, maka keterbelakangan umat Islam berkait erat dengan kebijakan pemerintahan Orde

<sup>13</sup> Marbun B. N. *Kamus Politik*. Cet I Pustaka Sinar Harapan Jakarta, 1996. 52.

<sup>14</sup> Dekdikbud, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, 649.

<sup>15</sup> *Ibid.* :

<sup>16</sup> Marbun B. N., 549.

Baru. Maka dipandang penting judul ini diangkat untuk diketahui supaya menjadi referensi bagi penelitian berikutnya.

2. Seiring dengan jatuhnya pemerintahan Orde Baru, kran kebebasan mulai terbuka lebar, sehingga umat Islam mengalami Euphoria Demokrasi. Mereka kemudian beramai-ramai membentuk partai-partai politik untuk mendapatkan kekuasaan. Posisi umat Islam saat ini agaknya telah mengalami kemajuan tidak seperti pada Orde Baru, realitasnya saat ini umat Islam banyak berada di lingkaran kekuasaan.
3. Ingin mengetahui sejauh mana peran dan kedudukan politik umat Islam pada masa pemerintahan Orde Baru dan Era Reformasi.

#### **E. TUJUAN PENULISAN**

1. Untuk mengetahui bagaimana aspirasi politik umat Islam pada masa pemerintahan Orde Baru.
2. Ingin mengetahui sejauh mana peran politik umat Islam dalam konstalasi politik Indonesia di masa Reformasi.
3. Untuk mengetahui sejauh mana peran dan kedudukan umat Islam pada masa Pemerintahan Orde Baru dan Reformasi.

#### **F. KAJIAN PUSTAKA**

Penulisan skripsi ini termasuk kajian pustaka yaitu meneliti beberapa literatur yang relevan dengan judul skripsi ini. Dari berbagai data yang diteliti

kemudian dianalisis secara logis untuk menarik sebuah kesimpulan literatur yang diteliti antara lain :

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

• M. Syafiq Agwar, *Pemikiran dan Aksi Islam Indonesia, Sebuah Kajian Politik tentang Cendekiawan Muslim Orde Baru*, isinya mengupas tentang peran politik ICMI pada masa pemerintahan Orde Baru.

- Abdul Aziz Thoba, *Islam dan Negara dalam Politik Orde Baru*, Gema Insani Press, isinya menjelaskan tentang keterkaitan negara dan Islam dalam politik.

Bagaimana posisi Islam dan bagaimana posisi negara pada masa pemerintahan Orde Baru.

- M. Dawam Raharjo, *Intelektual, intelegensia dan Prilaku Politik Bangsa, Risalah cendekiawan Muslim*. Isinya menjelaskan tentang resepsi Cendekiawan Muslim tentang perubahan sosial dan dakwah.

- Dari literatur, Tulisan Koran, Majalah, serta makalah-makalah yang ada kaitanya dengan tulisan kami buat.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

## G. METODE DAN SISTEMATIKA PEMBAHASAN

### 1. Metodologi Pembahasan

- a. Metode Historis yaitu Penyelidikan yang kritis terhadap keadaan-keadaan perkembangan serta pengalaman masa lampau dan menimbang secara cukup teliti dari sumber tersebut.

- b. Metode Diskriptif Analitik yaitu Mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat serta situasi tertentu, termasuk tentang hubungan tentang hubungan kegiatan, sikap-sikap, pandangan dan pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena.

## 2. Sumber data yang dikumpulkan

### a. Data primer :

- M. Syafi'I Anwar, *Pemikiran dan aksi Islam Indonesia, sebuah kajian politik tentang cendekiawan muslim Orde Baru*, Paramadina, Jakarta 1995.
- Drs. Abdul Aziz Thoba, MA. *Islam dan Negara dalam Politik Orde Baru*, Gema Insani Pres, Jakarta, 1996.
- Dawam Raharjo, *Islam dan Modernisasi: Catatan atas Paham Sekulerisasi Nurcholis Majid kata pengantar untuk buku Nurcholish Majid, Islam Kemoderenan dan ke Indonesiaan*, Mizan, Bnsung, 1994.
- M. Dawam Raharjo, *Intelektual, intelegensia dan Perilaku Politik Bangsa, Risalah cendekiawan Muslim*, Mizan Bandung, 1993.

### b. Data Sekunder

- Ali dan Bahtiar Efendi, *Merabah Jalan Baru Islam*, Mizan Bandung, 1986.
- Trisno Yowono, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Praktis*, Arkola, Surabaya, 1994.

- Depdikbud, Kamus Umum Bhasa Indonesia, Balai Pustaka. 1994.
- M. Nazir, Ph.D, Methode Penelitian Ghalis Indonesia, Cet, III, 1988.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

### 3. Analisis Data

Penulisan skripsi ini, dalam pembahasan penulisan menggunakan Deskriptif Analitis, yaitu mempelajari masalah-masalah dalam masarakat, serta tata cara yang berlaku dalam masarakat serta situasi tertentu, termasuk tentang hubungan kegiatan, sikap-sikap, pandangan dan pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena. Kemudian di analisa untuk mengadakan interpretasi yang lebih dalam tentang habungan mereka. Dan memakai Metode Historis, yaitu penyelidikan yang kritis terhadap keadaan- keadaan, perkembangan serta pengalaman di masa lampau dan menimbang secara cukup teliti dari sumber sejarah tersebut. Dalam skripsi ini penelitiannya bersifat riset kepustakaan (*library Research*) atau Dokumentasi, yakni suatu penelitian yang meneliti dari literatur-literatur yang ada relevansinya dengan masalah yang sedang dibahas dalam skripsi ini.

### 4. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika pembahasannya adalah:

## **BAB I : PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

### **B. Rumusan Masalah**

### **C. Penegasan Judul**

**D. Alasan Memilih Judul**

**E. Tujuan Penulisan**

**F. Kajian Pustaka**

**G. Metode dan Sistematika Pembahasan.**

**BAB II : PARTAI POLITIK ISLAM DALAM KONSTALASI  
POLITIK ORDE BARU**

**A. Sekilas Tentang Orde Baru**

**B. Sikap Umat Islam Terhadap Kebijakan Orde Baru**

**C. Peleburan Partai Politik Islam**

**D. PPP dan Aspirasi Umat Islam**

**E. Penerimaan Pancasila Sebagai Satu-satunya asas PPP  
dan Implikasinya.**

**BAB III : PARTAI ISLAM DALAM KONSTALASI POLITIK ERA  
REFORMASI**

**A. Liberalisasi Politik Era Reformasi**

**B. Partai Islam Era Reformasi**

**C. Aspirasi Politik Islam**

**BAB IV : KOMPARASI PERAN DAN KEDUDUKAN PARTAI  
ISLAM ORDE BARU DAN ERA REFORMASI**

**A. Peran dan Kedudukan Partai Islam Masa Orde Baru**

**B. Peran dan Kedudukan Partai Islam Era Reformasi**

**C. Komparasi Peran dan Kedudukan Partai Islam Orde**

**Baru dan Era Reformasi**

**BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN-SARAN**

**A. Kesimpulan**

**B. Saran-saran**

**Daftar Pustaka**

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

## BAB II

# PARTAI POLITIK ISLAM DALAM KONSTALASI

## POLITIK ORDE BARU

### A. SEKILAS TENTANG ORDE BARU

Secara politis, tumbangnya gerakan yang menamakan dirinya G 30 S/PKI pada tanggal 30 September adalah awal munculnya Orde Baru. Selanjutnya dengan dikeluarkannya Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar) sekaligus pengangkatan Jendral Soeharto menjadi pejabat Presiden tahun 1967 dan menjabat presiden Republik Indonesia tahun 1968, menandai surutnya dua kekuatan politik utama dalam pentas perpolitikan Nasional, yaitu Soekarno dan PKI.

Gagalnya gerakan G 30 S/PKI melakukan aksi makar berdampak sosial politik yang sangat luas, terutama bagi kelompok militer. Menjelang akhir tahun 1965 dan awal-awal tahun 1966 merupakan masa-masa yang sangat kritis bagi kehidupan politik bangsa Indonesia dalam kondisi yang sedemikian, baik parpol dan kelompok sosial keagamaan lainnya tidak mampu berbuat banyak akibat tekanan Orde Lama. Hanya ABRI sebagai *Central of Power* yang bisa berkehendak apa saja, namun kesempatan ini tidak dimanfaatkan oleh ABRI

untuk merombak pemerintahan militer. Akan tetapi yang dilakukan justru mengajak kaum teknokrat untuk menata perekonomian nasional.<sup>1</sup>

Selain dampak-dampak di atas, yang dirasakan oleh rakyat banyak adalah, *pertama*, adanya kekacauan dan konflik dalam masyarakat akibat adanya rangkaian krisis politik yang tidak pernah selesai sejak tahun 1965. *Kedua*, krisis bidang ekonomi, terjadi kemerosotan dan stagnasi, laju inflasi mencapai 650 %, <sup>2</sup> neraca pembayaran luar negeri yang sama sekali tidak berimbang dan devisa negara yang kosong.

Kelahiran Orde Baru selain berupaya memecahkan kesenjangan di atas, juga berupaya meluruskan dan mengoreksi upaya tindakan penyelewengan terhadap Pancasila dan UUD 45, serta menerapkannya secara murni dan konsekuen, sebagaimana yang dimaksud oleh Amir Mahmud bahwa Orde Baru pada hakikatnya adalah, *pertama*, suatu Orde yang merupakan tatanan seluruh kehidupan rakyat, bangsa dan negara yang diletakkan kembali kepada kemurnian pelaksanaan Pancasila dan UUD 45. *Kedua*, koreksi total atas penyelewengan yang terjadi pada masa sebelumnya. *Ketiga*, suatu proses sosial yang panjang, sebab penyelewengan yang terjadi pada masa lampau berjalan bertahun-tahun sehingga menyentuh hampir seluruh segi kehidupan bangsa Indonesia. *Keempat*, perubahan sikap mental yang mendahulukan kepentingan bersama dari pada

---

<sup>1</sup> Drs. Abd. Aziz Thaba, *Islam dan Negara dalam Politik Orde Baru*, Gema Insani Press. 1996, 185.

<sup>2</sup> *Ibid.*, 186.

kepentingan pribadi atau golongan dan yang memerlukan sikap dan pola kerja yang berorientasi pada program. Jadi perjuangan Orde baru ialah menyusun kembali kekuatan bangsa dan menentukan cara-cara yang tepat untuk menumbuhkan stabilitas jangka panjang, mempercepat proses pembangunan bagi bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 45 yang merupakan landasan ideal dan konstitusional.

Proses perubahan dari Orde Lama ke Orde Baru merupakan dua masa yang tidak dapat dipisah-pisahkan. Orde Lama dan Orde Baru dengan cara dan polanya sendiri telah memberi sumbangan besar kepada usaha penumbuhan dan pengembangan bangsa Indonesia. Dari sudut pandang ini, maka Orde Lama dapat dinilai sebagai masa persiapan dan pengalaman yang akhirnya mengantarkan kita kepada konklusi tentang perlunya menempuh jalan Orde Baru.

## **B. SIKAP UMAT ISLAM TERHADAP KEBIJAKAN ORDE BARU.**

Dalam dasawarsa 60-an, tema modernisasi masih terlalu awam bagi rakyat Indonesia pada umumnya, bahkan termasuk hal baru di kalangan umat Islam. Hal tersebut bila dibandingkan dengan negara Asia lain yang sudah lama menerapkan sistem modernisasi, Indonesia termasuk penumpang gerbong terakhir yang mengadopsi teori Barat tersebut.

Kebijakan (*Policy*) yang diambil oleh pemerintah tersebut, pada dasarnya untuk mendapatkan dukungan dan legitimasi politik rakyat, selain dimaksudkan

sebagai upaya menarik dukungan negara-negara Barat atau infestor asing untuk bisa memberikan bantuan bagi pelaksanaan pembangunan di awal Orde Baru.

Akan tetapi, kebijakan yang diambil pemerintah tersebut menjadi persoalan tersendiri bagi umat Islam. Sebab mereka berkeyakinan bahwa modernisasi adalah isu yang sengaja digulirkan oleh negara-negara Barat tak lain adalah Paham Westernisasi. Menghadapi masalah ini umat Islam dihadapkan pada dua pilihan. *Pertama*, ikut berpartisipasi atau mendukung kebijakan rezim Orde Baru yang berarti mendukung modernisasi yang nyata-nyata berkiblat pada Barat. *Kedua*, menolak dengan konsekuensi kehilangan kesempatan untuk berpartisipasi secara aktif dalam program pembangunan yang sudah mendapat dukungan luas dari berbagai pihak termasuk pihak di luar Islam.<sup>3</sup>

Dilema tersebut menimbulkan perbedaan di kalangan umat Islam dalam menanggapi modernisasi yang secara garis besarnya dikemukakan dalam beberapa pola. *Pertama*, pola apologi, namun diikuti dengan usaha penyesuaian diri dan adaptasi terhadap proses modernisasi. *Kedua*, juga melakukan apologi terhadap ajaran-ajaran Islam, tapi menolak modernisasi yang dinilai sebagai westernisasi dan sekularisasi. *Ketiga*, adalah pola tanggapan yang kreatif dengan menempuh jalan dialogis yang mengutamakan pendekatan intelektual dalam menanggapi modernisasi.

---

<sup>3</sup> *Ibid.*, 188 – 189.

Di kalangan angkatan tua golongan modernis, terutama yang pernah menjadi fungsionaris dalam kepengurusan Masyumi, lebih menekankan repolitisasi Islam sebagai upaya menumbuhkan kekuatan politik. Caranya adalah dengan mendesak pemerintahan Orde Baru merehabilitasi Masyumi. Sedangkan kelompok yang lebih muda yang berada di luar kepengurusan Masyumi, cenderung memperjuangkan rehabilitasi material, artinya yang lebih tertarik untuk aktif berkecimpung dan berpartisipasi dalam kegiatan politik Orde Baru. Bagi mereka ini, persoalan yang terpenting adalah mempersiapkan infrastruktur kegiatan politik umat Islam, serta membina struktur basis yang diperlukan untuk mendukung sistem politik yang demokratis.

Perbedaan pandangan mengenai partisipasi politik umat Islam di Era Orde Baru antara kelompok senior dan kelompok junior, menjadikan dua model perjuangan umat Islam saat itu. Disatu sisi, kelompok senior memandang rehabilitasi dan repolitisasi Islam sebagai hal yang sangat urgen. Sementara, kelompok muda lebih berfikir tentang jangka panjang. Mereka lebih tertarik dalam kegiatan membangun masyarakat dan bergerak dalam bidang pemikiran dari pada terjun langsung ke arena politik atau masuk birokrasi.

Namun demikian, usaha-usaha merehabilitasi Masyumi tersebut, diawal-awal Orde Baru itu tampaknya terus bergulir dan bahkan mendapat dukungan kuat dari simpatisannya. Usaha ini cukup membawa hasil, di antaranya dengan berdirinya Badan Koordinasi Amal Muslim (BKAM) tanggal 16 Desember 1965

yang mempersatukan 16 organisasi Islam dengan tujuan pokok rehabilitasi Masyumi.<sup>4</sup>

Usaha untuk merehabilitasi Masyumi didasarkan pada pandangan bahwa bubarnya Masyumi merupakan bagian dari gerakan politik PKI. Selain itu, umat Islam dan pemerintah telah berhasil menumpas pemberontakan PKI. Untuk itu umat Islam beranggapan bahwa rehabilitasi Masyumi merupakan konsekuensi logis sikap pemerintah terhadap bubarnya PKI itu sendiri.<sup>5</sup> Akan tetapi, logika tersebut tidak berlaku di kalangan pemerintah khususnya ABRI. Larangan pemerintah ini dilandasi oleh pemikiran serta kekwatiran sikap oposan dan pembangkangan dari Masyumi yang dapat mengakibatkan berbagai konflik politik, khususnya mengenai dasar negara yang dapat merugikan dan menghambat tercapainya tujuan pembangunan nasional. Bagi pemerintah, bukan masanya lagi membicarakan persoalan-persoalan ideologi, peranan partai-partai politik dan lain sebagainya yang bercorak ideologis politis. Kekhawatiran akan semakin menguatnya militansi Islam ini menjadi agenda utama pembicaraan para elit politik orde baru. Trauma masa lalu, "Pembangkangan" tokoh-tokoh Islam dan isu negara Islam menghantui benak para pengambil keputusan.

Lebih jauh lagi, setelah munculnya "Pernyataan Desember ABRI" tertanggal 21 Desember 1966 yang ditunjukkan pada Soekarno untuk mencegah

---

<sup>4</sup> M. Dawam Rahardjo, *Intelektual, Intelegensia dan Perilaku Bangsa*, Risalah Cendekiawan Muslim, Mizan Bandung, 1993, 381 – 382.

<sup>5</sup> M. Syafi'i Anwar, *Pemikiran dan Aksi Islam Indonesia. Sebuah Kajian Politik Tentang Cendekiawan Muslim Orde Baru*, Yayasan Paramidana Jakarta 1995. 27.

kegiatannya lebih lanjut. Akan tetapi, kenyataan ini juga menekankan bahwa “militer akan mengambil tindakan tegas terhadap siapapun dari pihak manapun dan golongan apapun yang menyimpang dari Pancasila dan UUD 1945 seperti yang telah dilakukan oleh pemberontakan partai komunis di Madiun, Darul Islam... dan Masyumi – Partai Sosialis Indonesia...”<sup>6</sup>

Berkenaan dengan pernyataan di atas, Prawoto (Mantan ketua umum Masyumi) mengirimkan surat kepada ketua Presidium Kabinet Jendral Soeharto, yang intinya merasa keberatan atas pernyataan bahwa Masyumi disenafaskan dengan PKI. Surat dari Prawoto ini mendapat tanggapan dari Jendral Soeharto tanggal 6 Januari 1967, mengenai keberatan merehabilitasi Masyumi. Atas alasan-alasan ketatanegaraan dan psikologi telah membawa ABRI pada satu pendirian, bahwa ABRI tidak dapat menerima rehabilitasi Masyumi.<sup>7</sup>

Upaya umat Islam saat itu untuk merehabilitasi Masyumi ternyata mendapatkan hambatan yang cukup berarti dari pemerintah. Apalagi secara jelas pemerintah menolak upaya tersebut. Sebagai pengganti dari Masyumi melalui Badan Koordinasi Amal Muslim (BKAM), akhirnya tanggal 7 April 1967 berdirilah Partai Muslim Indonesia (PARMUSI).

Adapun pertimbangan politis pemerintah mendirikan Parmusi adalah :

1. Menjadi wadah politik resmi bagi muslim modernis.

---

<sup>6</sup> Abdul Munir Mulhan, *Runtuhnya Mitos Politik Santri*, Sipers, Yogyakarta. 1992, 35.

<sup>7</sup> Thaba., 246 – 247.

2. Menyeimbangkan komposisi kekuatan partai politik.<sup>8</sup>

Tokoh-tokoh Masyumi saat itu menaruh harapan besar terhadap Parmusi, sebab partai ini akan menjadi partai yang representatif bagi umat Islam dan diharapkan nantinya orang-orang Masyumi akan menduduki kepengurusan di dalamnya. Akan tetapi, pemerintah mengambil kebijakan lain, bahwa Parmusi tidak ada sangkut pautnya dengan Masyumi. Ini artinya, tokoh-tokoh Masyumi tidak diperkenankan menduduki kepengurusan Parmusi.

Melalui SK Presiden No. 70, pemerintah mengangkat Djarnawi Kusumo dan Lukman Harun masing-masing sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jendral Parmusi. Akan tetapi kepemimpinan ini hanya bersifat sementara dan akan disempurnakan setelah mengadakan Kongres di Malang. Tampilnya dua tokoh ini, ternyata mendapat tantangan yang kuat dari J. Naro dan Imron Kadir (Naroka). Kedua tokoh yang disebut belakangan ini, mempunyai kedekatan dan hubungan yang erat dengan pemerintah. Kedua tokoh ini yang akomodatif Djarnawi dan Lukman Harun dengan alasan bahwa pemimpin Parmusi ini memusuhi ABRI dan akan menyusun personalia kepengurusan sendiri. Manuver politik Naroka ini akhirnya memicu konflik internal. Untuk meredam konflik tersebut, pemerintah mengambil keputusan untuk mengangkat HMS. Mintaradja dari Muhammadiyah untuk menjadi Ketua Umum. Persoalan tidak selesai begitu saja, sebab pada kepemimpinan Mintaradja pun, banyak menyingkirkan Djarnawi

---

<sup>8</sup> DR. A. Syafi'i Ma'arif, *Islam dan Politik, Teori Belah Bambu Masa Demokrasi Terpimpin, (1959 - 1965)*. Gema Insani Pres, Jakarta 1996, 81-82.

dan Lukman. Bahkan daftar calon pemilu yang disusun oleh Djarnawi dan Lukman banyak dipangkas oleh LPU, dan semua mantan aktifis Masyumi disingkirkan.<sup>9</sup>

Disebabkan oleh konflik internal inilah, persoalan di Parmusi tak kunjung selesai. Hal ini berdampak pada kurang siapnya Parmusi untuk menghadapi pemilu 1971. Pada pemilu perdana ini Parmusi hanya mampu di urutan ketiga dan NU, dengan perolehan 7,365 % suara.

Setelah pemilu 1971, seiring dengan terbentuknya sistem kepartaian yang hegemonik, pemerintah mulai melancarkan kontrol militer dengan melakukan penetrasi dalam semua bidang dengan tujuan status quo dan memperlemah kekuatan-kekuatan yang dapat megimbangi pemerintah.

### C. PELEBURAN PARTAI POLITIK ISLAM

Sebagaimana dijelaskan kerangka struktur politik pemerintah menghendaki penyederhanaan partai. Berdasarkan konsep tersebut, maka pada tahun 1973 seluruh partai Islam melakukan fusi ke dalam PPP. Hal tersebut memperoleh kekuatan hukum setelah disahkannya UU. No. 3 / 73.<sup>10</sup>

Gagasan penyederhanaan ini diawali dengan pengelompoan partai dalam perlemen. Pemerintah menyarankan pembentukan berdasarkan dua kelompok.

Yaitu :

---

<sup>9</sup> Thaba., 247 – 248.

<sup>10</sup> Mul Khan., 126.

1. Kelompok Materiil – Spiritual, terdiri atas partai-partai yang menekankan pembangunan materiil tanpa mengabaikan aspek spirituil, terdiri atas PNI, MURBA, IPKI, Partai Katolik dan Parkondo.
2. Kelompok Spirituil – Materiil, menekankan pembangunan spirituil tanpa mengabaikan aspek materiil, terdiri atas, NU, Parmusi, PSII, dan Perti.<sup>11</sup>

Fusi Partai Politik tersebut mempunyai dua makna :

1. Sebagai akhir sejarah panjang peranan parpol-parpol Islam.
2. Sebagai awal persatuan parpol-parpol Islam.<sup>12</sup>

Sejarah lahirnya PPP tidaklah sederhana. Nahdlatul Ulama' yang merupakan partai terbesar, pada awalnya kurang sependapat dengan adanya fusi walaupun pada akhirnya nyaris tanpa keributan intern NU sendiri. Sementara di tubuh PSII, munculnya fusi yang mengakibatkan regenerasi dalam tubuh PSII yang pada akhirnya menyetujui adanya fusi. Tapi lain hal bagi Parmusi dan Perti yang sejak awal menjadi motor terlaksananya fusi.

Para pendiri PPP sebagai satu-satunya partai Islam di Indonesia amat bergairah dan optimis tentang masa depan PPP, setelah sedih melihat hasil yang dicapai partai-partai Islam pada pemilu sebelumnya. Walaupun, proses penyaluran aspirasi ini sering terjadi konflik antara unsur-unsur yang ada dalam PPP khususnya antara Nahdlatu Ulama' dan Parmusi.

<sup>11</sup> Thaba., 235.

<sup>12</sup> *Ibid.*, 235.

Kesamaan identitas (Islam) dari parpol Islam, bukanlah satu jaminan adanya satu kerjasama ataupun satu persepsi dalam tubuh partai politik PPP. Hal ini disebabkan, masing-masing partai Islam yang telah melebur tersebut akan memperjuangkan kelompoknya untuk memperoleh jumlah suara yang besar, sehingga dapat menempatkan wakil-wakilnya yang duduk di legislatif lebih banyak.

Nampaknya, terjadinya fusi partai-partai Islam dalam Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ada yang memandang sebagai suatu kemudahan bagi kelompok lain untuk mengontrol partai tersebut, tetapi ada juga yang menganggap suatu ancaman. Berikut ada beberapa pandangan dari berbagai kalangan yang mencoba yang menyikapi adanya peleburan partai Islam.

Di tubuh Militer, ada tiga kelompok yang memandang secara berbeda mengenai fusi. Kelompok pertama menyarankan kepada pemerintah agar partai-partai Islam jangan disatukan dalam satu partai, karena dikhawatirkan suatu hari akan balik memukul dan akan menjadi ancaman bagi kekuatan ABRI. Untuk itu supaya dibiarkan partai-partai Islam terbagi seperti sebelum fusi. Paling jauh mereka disatukan dalam satu federasi yang longgar. Dengan demikian kekuatan Islam tidak akan menjadi kekuatan yang berarti dan akan tetap lemah. Sementara, kelompok kedua, memandang sebaliknya. Sebaiknya partai Islam disatukan dalam satu wadah, difusikan dalam satu pengelompokan. Dengan berfungsinya partai-partai Islam, maka kekuatan Islam akan lebih mudah dikontrol dan mudah dikuasai. Kelompok ketiga berpendapat bahwa, partai-partai Islam diberi tempat

yang wajar saja. Dibiarkan berkembang secara alami tetapi diberikan pengarahan untuk mewujudkan persatuan. Dari tiga kelompok justru kekuatan Islam harus dimanfaatkan semaksimal mungkin dalam pembangunan.

Terlepas dari berbagai pandangan dan tanggapan masyarakat luas, adanya peleburan partai-partai Islam justru menimbulkan konflik yang berkepanjangan antara NU dan Parmusi (MI) sebagaimana yang telah saya singgung diawal. Konflik berkepanjangan tersebut berawal dari pembagian jatah kursi kepengurusan bagi wakil-wakilnya di legislatif. Nahdlatul Ulama' merupakan partai terbesar Islam sebelum fusi, sudah seharusnya mendapat jatah paling besar dibanding partai Islam yang lain. Ini tentu logis, sebab didukung oleh suara masa yang besar pula.

Sementara Parmusi (MI) menempatkan kelompoknya sebagai penerus partai Parmusi, maka sudah sewajarnya jika Parmusi menentukan keberadaan PPP. Selain itu, Parmusi juga didukung kedekatan para fungsionarisnya dengan pemerintah. Justru dengan kedekatan inilah muatan-muatan PPP akan lebih berarti pada saat pengambilan keputusan.

Jelasnya baik Nahdlatul Ulama' maupun Parmusi (MI) merupakan unsur yang paling dominan dalam PPP. NU mempunyai basis masa tetapi pemimpinnya kurang memiliki keunggulan intelektualitas. Sebaliknya Muslimin Indonesia

mempunyai kualitas intelektual yang tinggi, tetapi memiliki kemampuan lobiying dengan pemerintah.<sup>13</sup>

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

#### **D. PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN DAN ASPIRASI UMAT ISLAM**

Umat Islam sebagai mayoritas penduduk Indonesia memiliki potensi untuk menyukseskan pembangunan nasional, sebagai unsur legitimasi sistem politik dan sumber dukungn dalam setiap pemilu. Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang merupakan peleburan partai-partai Islam, sudah sewajarnya merangkul potensi tersebut dan berusaha untuk tidak melepaskannya. Secara historis, PPP tidak terlepas dari umat Islam Indonesia yang menjadi mayoritas rakyatnya. Ikatan historis ini, tidaklah mudah untuk dilepaskan sekalipun sudah ada ide untuk melepaskannya dan memperluas basis partai itu kepada semua golongan masyarakat Indonesia. Sebab secara riil PPP sudah dicap sebagai partainya umat Islam, sekalipun pendukungnya sebagian kecil umat.<sup>14</sup>

Dalam konteks inilah agama Islam berperan secara signifikan :

1. Ia telah memberikan landasan identifikasi diri bagi PPP.
2. Ia telah pula berfungsi sebagai tema sentral perjuangan PPP.
3. Dalam masa pemilu ia bukan saja berfungsi sebagai pengikat masa secara keagamaan, tetapi telah juga menjadi alat untuk memberikan legitimasi keagamaan bagi kemenangan PPP.

---

<sup>13</sup> Thaba., 237 - 238.

<sup>14</sup> Arbi Sanit, *Partai Pemilu dan Demokrasi*, Pustaka Pelajar Yogyakarta, 1997, 25.

Kemudian, apa peran PPP terhadap umat Islam yang merupakan basis terbesar dari PPP ?. Sebab ketika sudah mengklaim dirinya sebagai partai Islam, tentu sudah sewajarnya dapat menjadi wadah sekaligus penyalur aspirasi pendukungnya.

Memasuki usianya yang kelima, PPP dihadapkan pada SU MPR 1978. Dalam sidang umum MPR 1978 tersebut, terdapat perbedaan yang sangat alot, khususnya di komisi B yang membahas tentang P-4, di mana di dalamnya memuat tentang aliran kepercayaan dalam GBHN, sebab memberikan pengesahan terhadap status abangan, priyai dan santri sebagaimana yang dikemukakan oleh Clifford Geertz. Implikasi dari dikotomi ini akan menyudutkan PPP, sebab sebagian besar mereka beragama Islam, walaupun tingkat penghayatan dan pengamalannya masih rendah. PPP beranggapan agar masalah kepercayaan ini dihapuskan dalam GBHN dan penganutnya agar kembali ke agamanya masing-masing.

PPP sebagai partai Islam pantas menolak draft GBHN yang diajukan oleh komite pekerja, sebab dalam draft itu dicantumkan beberapa hal :

1. Menggantikan pelajaran agama dengan Pendidikan Moral Pancasila dalam semua tingkatan sekolah umum.
2. Anggaran Belanja Negara 1973 / 1974 untuk urusan-urusan keagamaan diturunkan dari 1.226 juta menjadi 800 juta.

3. Persoalan masuknya aliran kepercayaan dalam GBHN sebagai bagian dari

“Agama resmi” yang kedudukannya setingkat dengan agama lainnya : Islam,

Kristen, Katolik, Hindu, Budha.<sup>15</sup>

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

FPP keberatan karena dimasukkannya Aliran Kebathinan dalam GBHN berarti pemerintah memberikan pengakuan terhadap Aliran Kebathinan tersebut. Padahal menurut FPP, pasal 29 ayat 2 sama sekali tidak dimaksudkan untuk mengatur Aliran Kcbathinan.<sup>16</sup>

Usaha pemerintah untuk meredakan konflik ini adalah dengan mengganti kata kebathinan dengan Aliran Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Pada akhirnya FPP menerima aliran kepercayaan dalam GBHN dengan catatan, sebagaimana pandangan umum fraksi-fraksi pada sidang pleno, bahwa :

“ Sekalipun FPP berpendapat bahwa rumusan tersebut belum memadai baik bobot, derajat, maupun kualitasnya... namun rumusan tersebut adalah hasil konsensus yang benar-benar merupakan hasil musyawarah”<sup>17</sup>

FPP tidak mendukung penyebaran dan pengembangan aliran kepercayaan dan mengimbau kepada seluruh penghayatnya untuk kembali kepada ajaran agamanya masing-masing :

“Diusahakan bimbingan dan pengawasan pertumbuhan aliran-aliran kepercayaan / paham-paham keagamaan supaya dapat kembali kepada induk agama masing-masing dan berusaha mencegah perkembangan aliran-aliran kepercayaan yang bertentangan dengan falsafah Pancasila serta keyakinan agama”<sup>18</sup>

---

<sup>15</sup> Thaba., 253.

<sup>16</sup> *Ibid.*, 255.

<sup>17</sup> *Ibid.*, 255.

<sup>18</sup> *Ibid.* 255.

## **E. PENERIMAAN PANCASILA SEBAGAI SATU-SATUNYA AZAS PPP DAN IMPLIKASINYA.**

Gagasan untuk menyeragamkan azas kekuatan politik yakni Pancasila dikemukakan oleh Presiden Soeharto tatkala berpidato di depan sidang Paripurna DPR. Gagasan seperti ini merupakan salah satu bagian dari “paket” upaya pemerintah untuk mewujudkan stabilitas politik yaitu dengan menghapus “azas ciri” yang terdapat dalam kedua partai politik, selain Pancasila, seperti PPP dengan “Islam” nya atau PDI yang bercirikan “ Demokrasi Indonesia, Kebangsaan Indonesia dan Keadilan Sosial...”<sup>19</sup>

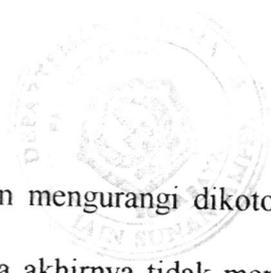
Dampak dari sasaran pemerintah di atas, mau tidak mau partai – tidak terkecuali PPP – harus menyesuaikan dengan kebijakan yang diterapkan. Dalam kondisi demikian, banyak organisasi kemasyarakatan dan keagamaan serta partai politik yang dihadapkan pada dilema antara ideologi yang menjadi ciri dan identitas organisasinya dengan ideologi atas rekayasa pemerintah.

Gagasan pemerintah tersebut didasarkan atas pengalaman sejarah masa lampau bahwa dengan sistem multi partai yang juga ditandai oleh banyak azas dan ciri, ternyata gagal dalam membina stabilitas politik untuk membangun pemerintah yang efektif.

Menanggapi gagasan pemerintah diatas, ada berbagai ragam pendapat. Sebagian menaruh harapan atas penyeragaman azas tunggal tersebut, sebab

---

<sup>19</sup> M. Rusli Karim, 219.



dengan adanya kesamaan azas, sedikit banyak akan mengurangi dikotomi atau pengkotak-kotakan di tengah masyarakat, yang pada akhirnya tidak mendukung terwujudnya persatuan dan kesatuan. Argumen seperti ini didasarkan pada pengalaman masa lampau, di mana terdapat banyak partai atau wadah yang tentunya akan banyak pula menimbulkan konflik yang tidak berkesudahan. Sebagaimana yang lain berpendapat, justru dengan adanya penyeragaman azas ini, berarti mengingkari keberagaman yang ada dalam masyarakat.

Perubahan yang besar setelah SU MPR 1983 tersebut, memaksa PPP, mau tidak mau, dan dengan segala konsekuensinya harus menerima Pancasila sebagai ideologi barunya. Azas ini diberlakukan setelah Muktamar PPP Agustus 1984 Azas PPP menjadi Pancasila sesuai dengan Tap MPR. Kemudian DPR membuat UU perubahan pemilu tentang penggunaan tanda-tanda gambar baru yang mencerminkan Pancasila. Akhirnya tanda gambar Ka'bah bagi PPP diganti dengan Bintang.

Dengan penggantian gambar atau simbol PPP tersebut, terjadilah apa yang disebut "Dekralisasi Partai Politik". Ini berarti, secara formal tidak ada lagi partai politik yang dapat mengklaim dirinya sebagai partai politik Islam. PPP lalu mengalami krisis identitas, karena secara formal mereka bukan lagi parpol Islam.<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> Thaba., 236.

Perubahan ideologi dan lambang PPP tentu menimbulkan pro dan kontra yang cukup hangat. Ada yang menganggap itu proses de-Islamisasi politik dan depolitisasi Islam. Tetapi ada juga yang menggunakan istilah lebih lunak lagi, yaitu “deformalisme Islam” yaitu proses penanggalan bentuk-bentuk formal Islam, tetapi substansinya tidak berubah. Bagi Ketua Umum J. Naro, Pancasila disambut baik sebagai azas tunggal. J. Naro menuntut penegakan demokrasi Pancasila sangat meminta perhatian. Kemiskinan dan ketidakadilan struktural yang ada dalam masyarakat mengharuskan kita untuk mengembangkan nilai-nilai keadilan sosial. Dengan Pancasila sebagai satu-satunya azas, tidak akan mempersempit ruang gerak bagi kehidupan beragama di kalangan masyarakat kita. Jadi kita perlu ada kekwatiran Pancasila akan diagamakan dan agama akan di Pancasilakan.

Akan tetapi, sejak pemerintah dengan UU No. 5 tahun 1985 tentang keharusan menggunakan azas tunggal bagi ormas dan orpol, berpengaruh besar bagi perjalanan PPP, yaitu semakin berkurangnya perolehan suara pada pemilu 1987. Tetapi tanpa orang-orang yang memiliki basis massa dan terputusnya hubungan tradisional PPP dengan massa umat, jumlah suara yang diperoleh saat itu adalah 15,97 % suara. Kalau pada pemilu sebelumnya yakni pada tahun 1971, 1977, 1982 PPP menggunakan ideologi Islam dalam memobilisasi massa, akan tetapi kali ini PPP kesulitan untuk mengangkat tema kampanye, sehingga berdampak pada perolehan suara yang menurun.

Satu lagi fenomena yang menarik adalah keluarnya NU dari unsur PPP setelah muktamar ke 27 di Situbondo mengambil kebijakan untuk kembali ke Khittah.<sup>26</sup> Artinya secara organisatoris NU tidak terikat dengan salah satu parpol manapun. Sementara itu, anggota NU yang secara dirugikan oleh Naro melakukan aksi pengembosan terhadap PPP dalam pemilu 1987 sehingga perolehan suaranya menurun.<sup>21</sup> Selain itu warga NU dipengaruhi oleh rasa kekecewaan pada Naro dalam pemberian jabatan pengurus dan jatah kursi di legislatif.

Menurunnya suara yang diperoleh PPP juga dipengaruhi oleh UU No. 1 tahun 1985 pasal 20 ayat 1 yang mengatakan bahwa kampanye pemilu dilarang mempersoalkan Pancasila dan UUD '45. Tema kampanye pemilu adalah program tiap-tiap Organisasi Peserta Pemilu (OPP) yang berhubungan dengan pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila. Kampanye harus ditekankan pada program kerja organisasi peserta pemilu, bukan pada orientasi ideologi. Peraturan pemerintah tersebut di satu pihak sangat baik bagi pendidikan politik rakyat sekaligus mencoba mencari bentuk kampanye yang mampu menarik simpati rakyat, di satu sisi tidak menguntungkan bagi OPP khususnya PPP, sebab merasa kesulitan mengangkat isu kampanye.

Hal inilah yang memberatkan PPP, manakala Agama (Islam) tersebut semakin dijauhkan dari panggung politik. Dengan semakin kecilnya pengaruh

---

<sup>21</sup> Thaba., 217.

agama dalam politik – yang berarti semakin terkucilnya umat Islam dalam PPP, maka dilihat dari usaha partai untuk melakukan kegiatan dalam rangka mengikutsertakan masyarakat dalam berpolitik, jelas PPP akan mengalami kesulitan dalam menarik massanya, jika agama harus dilepaskan sama sekali dari politik, Islam saja yang dapat dijadikan pengikat solidaritas umat Islam, sebagai akibat dari ketiadaan kegiatan partai di dalam masyarakat.<sup>22</sup> Dalam hubungan dengan penyeragaman azas ini PPP-lah yang langsung merasakan akibatnya. Dan dengan demikian pada perkembangan berikutnya tak mustahil jika PPP pun akan semakin terasing dari umat Islam.<sup>23</sup>

Dan semenjak saat itu terjadi heterogenitas atau diversifikasi partisipasi di kalangan umat Islam dalam rangka mengeluarkan aspirasi politik, karena umat tidak mempunyai partai yang menjadi identitas tersendiri dan yang sesuai dengan aspirasi pendukungnya.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

---

<sup>22</sup> Abdul Munir Mul Khan, 258.

<sup>23</sup> *Ibid.*, 258.

### BAB III

digilib.uinsa.ac.id PARTAI ISLAM DALAM KONSTALASI digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

## POLITIK ERA REFORMASI

### A. LIBERALISASI POLITIK ERA REFORMASI

Runtuhnya rezim orde baru dan naiknya era reformasi 21 Mei 1998, Indonesia memasuki fase “liberalisasi politik awal”. Inilah fase yang ditandai serba tidak pastian. Liberalisasi politik awal pasca Soeharto ditandai antara lain oleh terjadinya redefinisi hak-hak politik rakyat. Daftar hak yang dimasa sebelumnya begitu pendek, dalam fase ini telah memancang secara drastis. Setiap kalangan menuntut kembali hak-hak politiknya yang selama bertahun-tahun diberangus oleh orde baru. Sebaliknya, hampir tak ada kalangan yang peduli kepada kewajiban-kewajiban politik mereka.

Dalam kerangka itu terjadilah luapan kebebasan. Kehidupan politik digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id ditandai oleh naiknya kebebasan sebagai suasana dan tuntutan umum ditengah masyarakat, pembebasan tahanan dan narapidana politik adalah simbolisasinya yang paling awal dan paling tegas, dan yang tak terhindarinya di tengah fase liberalisasi politik awal adalah terjadinya ledakan partisipasi politik.<sup>1</sup> Ini tentunya konsekuensi logis dari pelekangan partisipasi politik yang berlebihan dimasa orde baru.

<sup>1</sup> Eep Saifullah Fatah, *Memmtaskan Perubahan I : Catatan Politik 1998 – 1999*, Penerbit Mizan Anggita IKAPI Bandung, 2000, 152.

Ledakan partisipasi politik awal liberalisasi banyak mengambil bentuk huru-hura, kekerasan massa, amuk serta praktek penjarahan kolektif. Bentuk-bentuk luapan partisipasi semacam ini banyak sekali terjadi di berbagai tempat di Indonesia. Seperti yang terjadi di kalangan mahasiswa dan elite politik sebagai berikut :

*Pertama* : Ledakan di kalangan mahasiswa yang mengalami surplus kepercayaan diri. Setelah berhasil menjatuhkan H.M. Soeharto, hanya gerakan pendek Februari - Mei 1998 yang berbentuk dalam demonstrasi atau protes berbasis massa. Gerakan Februari - Mei yang kerap disebut sebagai gerakan Reformasi gelombang pertama, pada gelombang kedua yang diikuti dengan Reformasi, dalam bentuk demokrasi dan protes yang tidak pernah surut sewaktu Soeharto turun.

*Kedua* : Ledakan di kalangan elite politik non kampus, ledakan partisipasi politik terjadi di dalam terbentuknya dan maraknya partai-partai politik dan ledakan partisipasi politik serupa juga terjadi secara terang-terangan di kalangan umat Islam. Dalam bentuk dan persoalannya yang dimunculkan oleh ledakan partisipasi politik di kalangan umat Islam ini, sebagai jalan masuk ke pencarian format baru politik Islam di Era Reformasi.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Bakhtiar Efendi, *Repolitasi Politik*, Penerbit Mizan Anggota IKAPI Bandung, 2000, 208.

Secara umum, sepeninggalan Soeharto di kalangan Islam mengalami ledakan partisipasi yang luar biasa drastis. Di antara 123 Partai politik telah terbentuk hingga minggu ketiga Desember 1998, ada hampir 20 parpol yang memakai label Islam, yang delapan di antaranya memakai Islam sebagai asas termasuk PPP yang dalam Mukhtamarnya belum lama ini kembali ke khittah pro asas tunggal. Selain itu ada sekitar 30 parpol yang dengan tegas menjadikan komunitas muslim sebagai basis atau target massanya.

Memasuki liberalisme politik. Politik Islam dituntut untuk mewujudkan prinsip-prinsip politik seperti yang telah digariskan oleh diktum Islam itu sendiri yaitu menciptakan cita-cita politik Islam yang sering digambarkan sebagai "*Baldatun toyibatun wa robbun ghafur*" (negara makmur dan diridloi Tuhan). Maka ini harus dipahami sebagai negara yang berkeadilan. Bebas dari penindasan, KKN, dan lain-lain. *Amar ma'ruf nahi munkar* harus di reaktualisasikan sebagai pengendara serta pengakuan hak-hak rakyat, dan *nahi munkar* diartikan sebagai pembebasan dan emansipasi bagi kalangan tertindas.

Ledakan partisipasi di kalangan Islam juga terjadi dalam bentuk yang tidak permanen semacam pembentukan partai, tetapi dalam bentuk forum atau aksi insidental seperti : Pelaksanaan Apel Akbar Umat Islam, Kongres Umat Islam II ( KUI II) yang diadakan sepekan sebelum sidang istimewa MPR (November 1998) forum semacam ini bertempat dalam berbagai bentuk seperti

---

<sup>3</sup> Bakhtiar Efendi., 228.

Kongres Mahasiswa Islam (minggu ketiga Desember 1998) menjelang subuh bersama, mendekati Ramadhan bersama Habibi dilakukan serentak di masjid-

masjid Agung<sup>4</sup>

Mengamati ledakan-ledakan partisipasi politik yang terjadi dikalangan Islam mempunyai gejala yang membingungkan parlemen di tengah suasana Reformasi. Ada indikasi di kalangan Islam yang mengalami depolitisasi yang betuknya prematur yang sulit ditebak formatnya, kedua ada indikasi di kalangan Islam yang mengalami reintegrasi, ketiga indikasi (Re) fragmentasi (Re) disintegrasi.

Agenda pertama dalam menyokong Reformasi menyeluruh adalah kelaliman politik di kalangan Islam yang tidak dapat dilepaskan dari perpolitikan. Artinya politik Islam hanya disokong oleh karakter sistem politik yang menjadi konteksnya. Sistem politiknya yang eksklusif non partisipasi dan anti publik, itulah yang menjadi kekeliruan politik Islam. Oleh karena itu, membangun format baru politik Islam harus dimulai dengan keikutsertaan dalam menyongsong Reformasi yang menyeluruh.

Reformasi yang menyeluruh harus didukung oleh kalangan Islam yang meliputi empat tingkat reformasi yang harus dibutuhkan pasca Soeharto. Yaitu : *Pertama* Reformasi kepemimpinan nasional yang otentik, kepemimpinan otentik adalah yang tidak mempunyai beban psikologis yang mengagendakan anti KKN

---

<sup>4</sup> *Politik Demi Tuhan : Nasionalisme Relegius di Indonesia*, Editor : Andito (Abu Zahra), Pustaka Hidayah Bandung, 1999, 397.

karena ia sendiri tidak terlibat KKN. *Kedua* Reformasi karakter kekuasaan. Kalangan Islam harus menjadi penyokong Reformasi karakter kekuasaan politik guna tidak terulang lagi karakter kekuasaan Orde Baru yang bermasalah yang bercirikan sentralisasi (menjadikan kekuasaan otonom dari masyarakat). *Ketiga* Reformasi perubahan sistemik. *Keempat* Reformasi paradigma atau pergeseran paradigma<sup>5</sup>

Agenda kedua menuju forum baru politik Islam adalah membangun umat Islam bersedia berbagai institusi yang bisa didirikan ditengahnya sebagai publik dan oposisi. Agenda yang paling panjang bagi umat Islam untuk mengubah wajah atau format politik Islam. Keberhasilan dari kegagalan dalam masalah ini yang menentukan apakah politik Islam berhasil membangun format barunya atautkah gagal dalam membangun format baru bagi umat Islam. Publik yang dimaksudkan di sini adalah bukanlah sebuah definisi pasif, melainkan aktif. Publik adalah sebuah komunitas yang memiliki aspirasi politik maupun memelihara dan mengembangkan aspirasi itu, mampu mengartikulasikannya dihadapan khalayak yang luas serta mempunyai siasat dan keberanian untuk mendesak ke dalam sistem perumusan kebijakan.

Kekeliruan-kekeliruan politik lama di kalangan Islam bisa terus terulang lantaran umat Islam sejak lama memang belum terbentuk sebagai publik. Apalagi

---

<sup>5</sup> *Politik Demmi Tuhan*, 397.

dalam 40 tahun terakhir, sistem politik Islam memang anti publik (tidak memberi keluasaan bagi pembentukan ruang).

Agenda ketiga membangun oposisi permanen. Selain membentuk publik, format baru politik Islam, maka seyogyanya di tandai oleh pembentukan kantong oposisi permanen di kalangan Islam. Oposisi permanen di kalangan Islam berfungsi sebagai pengawas – invern segala kekeliruan yang diproduksi sistem politik. Dengan cara beroperasi yang sesuai dengan tuntutan *amar ma'ruf nahi munkar* di kalangan Islam akan memiliki posisi dan peranan yang signifikan.<sup>6</sup>

Dari agenda ketiganya itu yang menuju formt baru politik Islam tidaklah mudah untuk dilaksanakan di tengah perkembangan politik Islam mutakhir yang serta tidak pasti dan membingungkan, dan ada beberapa kendala yang mesti dipecahkan untuk mencari pemecahan. Kendala yang *pertama* adalah belum adanya konsesus masalah-masalah di kalangan Islam, *kedua* belum adanya konsesus tentang target-target mendasar bagi kalangan Islam, *ketiga* masih buruknya komunikasi di kalangan Islam, *keempat* masih lemahnya berorganisasi, *kelima* belum tegaknya ideologi atau monolitas politik Islam.

Untuk menghadapi kendala-kendala itu kalangan Islam harus mengubah pendekatan yang selama ini semata-mata memosisikan Islam sebagai individual

---

<sup>6</sup> *Politik Demi Tuhan*, 400.

Era Reformasi membuat wajah politik berubah dari sistem 3 partai menjadi multi partai. Kecenderungan untuk mendirikan partai politik baru menjadi wacana politik menyusun tekad semua pihak dari komponen dan anak bangsa untuk melakukan Reformasi politik secara mendasar dan total yakni demokratisasi, transparansi dan legalitas yang konsekuensinya pemerintah harus meninjau ulang UU Pemilihan umum dan sistem kepartaian yang lebih aspiratif.

Begitu juga dengan umat Islam yang secara kualitatif sebagai mayoritas penduduk di Indonesia sehingga aspirasi politiknya berfariasi. Maka berdirilah partai-partai politik yang berasaskan Islam maupun berkaidah Islamiyah sebagai wadah aspirasi umat Islam yang menghendaki formalisme Islam dalam politik.

Konsekuensinya umat Islam harus berbenah diri menata kembali agar mereka memperbaiki kekuatannya untuk ikut adil dalam menyusun pemikiran dan aksi reformasi berskala nasional, adanya partai politik Islam sebagai wadah aspirasi dan kepentingan umat Islam mencoba menjebatannya sehingga melalui partai politik umat Islam berdemokrasi secara konstitusional yang mengikuti pemilihan umum 1999 sebagai pintu awal untuk melihat sejauh mana aspirasi umat Islam terhadap partai politik Islam di Era Reformasi ini.

Pembahasan studi ini berkisar pada diskripsi dan dinamika partai politik Islam khususnya partai PBB dan Partai Keadilan. Pembatasan pembahasan ini bertujuan untuk memudahkan penganalisaan.

## 1. Partai Bulan Bintang (PBB).

### a. Sejarah terbentuknya PBB

DR. Anwar Hardjono mendapat mandat dari pimpinan Masyumi satu bulan sebelum Masyumi bubar karena Kepres No. 200 Tahun 1990. Sehingga pada Reformasi ini DR. Anwar Hardjono menggagas lebih bersama keluarga PBB lainnya untuk mendirikan partai Masyumi, maka berdirilah partai politik yang di deklarasikan di Jakarta hari Jumat 23 Rabiul Awal 14 19 H / 17 Juli 1998 dengan nama PBB. Yang diketuai oleh Prof. DR. Yusril Ihza Mahendra. SH. Sedangkan ada beberapa alasan yang dapat menyelesaikan munculnya Pragmentasi munculnya politik Islam dengan mempercayai relevansi agama dengan kehidupan sehari-hari, baik agama sebagai landasan kritisme, perubahan menuju untuk menentukan moralitas masyarakat. Adapun alasan-alasan itu adalah :

- Adanya keyakinan bahwa Islam menyediakan visi politik sekaligus memiliki pengalaman politik yang dapat direkonstruksi dalam keyakinan ideologi yang reperentatif tampak meminjam ideologi lama. Respon terhadap Islam memiliki prinsip-prinsip fundamental, sebagai sesuatu ideologi ditunjukkan oleh partai-partai politik baru berlabel Islam, seperti PBB, PK, PPP, PKU dan lain-lain. Basis ideologi dan sosial partai tersebut menonjolkan asas keagamaan, karena menggunakan simbol dan idiom agama sebagai acuan utama dalam

memperjuangkan program dan kepentingannya termasuk dalam merebut massa pemilihan.

Adanya keyakinan Islam merupakan ide yang memiliki wawasan politik dan orientasi politik kontekstual dan inklusif yang menentukan manifestasi nilai-nilai keagamaan dan penampilan simbol-simbol politik yang terbuka dan bisa diterima semua orang, kontruksi ideologi dan sosialnya dilakukan dengan mengintegrasikan kepentingan agama dan kebangsaan. Selain itu lebih moderat dan realitis dalam menempatkan ideologi dalam negara, pemahaman ini seperti diwakili oleh PKB dan PAN yang keduanya secara kultur tidak bisa dilepaskan dari basis massa organisasi keagamaan.<sup>8</sup>

Meskipun partai-partai ini menggunakan simbol-simbol dan idiom Islam sebenarnya secara substansial imajinasi politik mereka tidak terlalu jauh dari *platform* atau agenda politik partai-partai lain. Hal ini bisa dilihat dalam diskripsi tentang partai-partai politik yang disiapkan. Di sini dijelaskan tak satupun partai-partai politik Islam mengembangkan gagasan-gagasan yang bersifat Legalistic formalistik, eksklusif. Pada tingkat pemilihan-pemilihan yang bersifat substansial, partai-partai Islam pada dasarnya masih menunjukkan komitmen mereka untuk membangun Indonesia yang lebih demokratis.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Abdul Mun'im, *Islam Ditengan Arus Transisi*, 150

<sup>9</sup> Bakhtiar Efendi, *Teologi Baru*, 58.

Sehubungan dengan itu juga merebaknya tindakan pemberlakuan kembali Piagam Jakarta dalam konstitusi pada sidang tahunan MPR 2000, aspirasi itu muncul atas keinginan dari Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Bulan Bintang sebagai pembenahan janji politik mereka saat kampanye. Dalam kampanye di Propinsi Daerah Yogyakarta 26 November tahun 1998, Ketua Umum PPP Hamzah Haz mengatakan untuk memperjuangkan Piagam Jakarta masuk UUD 1945, tetapi PPP sama sekali tidak menginginkan berdirinya negara Islam di Indonesia.

Dengan demikian persoalan simbolisme dalam politik Islam tidak begitu saja dapat dihilangkan. Pengalihan oleh para pemikir dan para aktifis politik Islam dari masa orde baru dari legalisme, formalisme dan simbolisme kepada substantivisme hanya berhasil secara parsial pada tingkat ide. Sedangkan formalisme, simbolisme itu diperlukan untuk menggalang kekuatan masa.<sup>10</sup>

Dalam rangka mewujudkan masyarakat madani melalui tahapan pemilihan umum. Maka PBB menggunakan strategi perjuangan partai yang terkristalkan dalam *platform* dan program kerja yang berpijak pada karakteristik.

- Robbaniyah (Ketuhanan)
- Insaniyah (Kemanusiaan)

<sup>10</sup> Bakhtiar E fendi. *Repolitikasi* ..., 173.

- Syumul (Universal)
- Wasqiyah (Moderat)
- Waqiiyyah (Konstektual)
- Wudhuh (Jelas dan terang)

b. Platfom PBB.

Yang dijadikan dasar perjuangan yakni membentuk sistem kenegaraan yang kokoh dan kuat, demokrasi serta konstitusional yang dipandu oleh ajaran Islam secara kaffah.

Visi PBB adalah terwujudnya negara Indonesia yang maju adil dan makmur sejahtera merata dalam limpahan rahmat dan maghfirah Allah SWT.

Misi PBB adalah pembangunan bangsa dan negara dengan pembangunan yang Islami yang dipimpin oleh pimpinan nasional yang mengerti dan peduli tentang nilai-nilai kebenaran Islam, berakhlak mulia, berilmu dan memahami esensi bangsa yang majemuk yang didukung oleh demokrasi yang taat beragama berbudi dan profesional.<sup>11</sup>

2. Partai Keadilan.

a. Sejarah terbentuknya PK.

Realitas bangsa Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam, tetapi minoritas dalam politik semenjak Indonesi merdeka sehingga

<sup>11</sup> *Memilih Partai Islam*, Tim editor, Sahar L. Hassan (et al) -Cet . I.- Jakarta : Gema Insani Press, 1998, 22 .

Makna lambang PK Secara menyeluruh yaitu menegakkan nilai-nilai keteladanan yang berlandaskan pada kebenaran, persaudaraan dan persatuan menuju gemilang dan kejayaan umat dan bangsa.

Orientasi PK dititik beratkan kepada dakwah dengan nyata yang berkesinambungan menuju masyarakat madani. Hal ini tidak sama dengan partai lainnya yang orientasi, politiknya hanya pada kekuasaan belaka. Namun PK, kekuasaan bukanlah tujuan utama. Sebab apalah artinya sebuah kekuasaan kalau partisipasi umat tidak ada. Meskipun ada hanyalah pada saat pencoblosan belaka.

Oleh karena itu PK berjuang bagaimana memproses masyarakat agar mengetahui hak dan kewajiban politik melalui pendekatan keagamaan dan pendidikan. Pendekatan sosial yang demikian itu diharapkan masyarakat secara langsung merasa diuntungkan dengan kehadiran partai yang berorientasi kerakyatan bukan orientasi kekuasaan belaka.

#### b. Platform PK

*Platform* PK yaitu suatu gerakan yang mempunyai karakteristik moralis, profesional, patriotik moderat, reformis dan independen. Karakteristik tersebut sebagai ciri khas PK dalam gerakannya menggunakan prinsip-prinsip dasar sebagai pijakan agar kokoh yang bermuara pada cita-ciat normatif sekaligus. Sebagai kristalisasi keyakinan atas realitas historis dan harapan masa depan bangsa dan negara Indonesia.

Adapun prinsip dasar itu adalah keadilan, persamaan, keseimbangan, kesatuan nasional, kemajuan demi persatuan dan kerjasama.

Sedang *platform* PK dari sisi visi dan misi adalah mewujudkan masyarakat madani ke-Indonesiaan di masa depan sebagai pra syarat penyampaian modal kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam posisi ini PK memiliki visi kepartaian mencerminkan keinginan untuk tujuan-tujuan berikut :

- Menjadi wadah pendidikan politik umat Islam
- Menjadi unsur perekat kesatuan umat
- Menjadi akselator bagi wujudnya masyarakat madani Indonesia.

Sedangkan misi PK adalah :

- Berjuang mewujudkan masyarakat madani di Indonesia
- Menegakkan eksistensi politik umat Islam
- Mengembangkan tradisi profesionalisme dalam berbagai bidang kehidupan berbangsa dan negara.

Sedangkan mengenai sikap politik PK yaitu reformasi harus ditegakkan, pencabutan asas tunggal Pancasila, pencabutan Kepres yang merugikan rakyat dan negara, penghapusan Tap MPR-RI tentang P4, pencabutan Dwi Tunggal ABRI, mengadili Soeharto secara benar.

### C. ASPIRASI POLITIK ISLAM.

Para pemikir dan aktifis politik Islam, telah berusaha untuk menyelesaikan sejumlah persoalan untuk menjabatani hubungan politik antara Islam dan negara yang dianggap mempunyai kendala baik oleh politik negara maupun sebagian komunitas muslim untuk sepenuhnya dapat membaaur dalam kehidupas sosial. Ekonomi dan politik Indonesia yang disesuaikan dengan struktur sosial dan politik yang ada<sup>12</sup>

Setelah Orde Baru, saat adanya liberalisasi politik. Politik Islam dituntut untuk mewujudkan prinsip-prinsip politik seperti yang telah digariskan diktum Islam itu sendiri yaitu menciptakan cita-cita politik Islam yang sering digambarkan sebagai *baldatun thoyyibatun warobbun ghofur* (negara yang makmur dan diridhoi Allah SWT). maka ini harus dipahami sebagai negara berkeadilan, bebas dari penindasan, kolusi, korupsi, nepotisme dan lain-lain. *Amar ma'ruf nahi munkar* juga harus direaktualisasikan sebagai penyadaran serta pengakuan hak-hak rakyat, dan nahi munkar diartikan sebagai pembebasan dan emansipasi bagi kalangan tertindas.

Untuk mewujudkan semua itu salah satunya dengan kekuasaan politik yaitu dengan jalan mendirikan partai-partai politik baik yang menggunakan label Islam dan asas Islam seperti PPP, PBB, PK, PKU dan lain-lain maupun partrai politik yang berbasis massa Islam sebagaimana PKB dan PAN.<sup>13</sup> Partai-partai

<sup>12</sup> Bakhtiar Efendi, *Teologi...*, 141.

<sup>13</sup> Bakhtiar Efendi, *Repolitisasi...*, 228.

Islam sebagai sarana perjuangan untuk menegakkan nilai-nilai yang berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist.

Untuk memperjuangkan dan mengimpletasikan nilai-nilai tersebut harus mempunyai posisi, yang merupakan kekuatan untuk memperjuangkan nilai-nilai tersebut. Sehingga para politisi Islam dalam mewarnai panggung politik nasional harus seorang moralis, yang bukan mengejar kekuasaan untuk kepuasan diri, tetapi untuk mengabdikan kepada agama, bangsa dan negara.

Dengan demikian para politisi maupun umat Islam secara keseluruhan dalam kehidupan politik, dalam pola sikap dan prilakunya harus bersandar pada nilai-nilai ajaran Islam bukan berdasarkan menghalalkan segala cara.

Memang keberadaan partai-partai politik Islam itu akan menimbulkan beberapa pemikiran positif dan negatif. Positifnya ; *Pertama*, yaitu rakyat akan semakin terbuka untuk menyalurkan aspirasi politiknya tanpa diintimidasi, kebebasan itu akan menjadikan rakyat semakin rasional, kritis dan partisipatif dalam mengikuti segala proses yang sedang terjadi. *Kedua*, proses sosial politik akan lebih terbuka dan transparan sehingga budaya penggarapan dalam intervensi penguasa kepada segala bentuk segala bentuk mekanisme sosial yang berkembang di masyarakat saat itu menjadi tabu. *Ketiga*, umat Islam diuntungkan karena adanya partai politik yang memperjuangkan aspirasinya.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> Abdul Mun'im, *Islam di Tengan Arus Transisi*, 124.

Aspek negatifnya ; *Pertama*, bila arus keterbukaan ini berkembang menjadi anarkhi, sehingga akan menghancurkan jalannya reformasi dan nilai-nilai toleransi agama. *Kedua*, karena keberagaman pandangan politik Islam antara partai Islam. *Ketiga*, kecurigaan ideologis akan dihembuskan oleh banyak kelompok anti Islam dalam usaha membuat citra yang buruk terhadap partai Islam.<sup>15</sup>

Jadi, sejauhmana Islam dapat berperan sebagai sumber daya politik dan sangat tergantung pada pelakunya dan juga kekuatan-kekuatan dan memanfaatkan sumber daya politik Islam yang pada dasarnya mencakup dua elemen yaitu nilai-nilai yang bersifat substansialistik dan idiom atau simbol-simbol ke-islaman itu. Oleh karena itu imbauan untuk tidak menggunakan idiom atau simbol-simbol Islam dapat diartikan sebagai upaya mengurangi makna sumber daya politik itu sendiri.<sup>16</sup>

Munculnya partai-partai itu juga menunjukkan repolitisasi Islam dalam artian maraknya kehidupan politik Islam. Format atau munculnya kembali kekuatan politik Islam, karena Islam memang tidak bisa dilepaskan dari politik.<sup>17</sup> Selain itu juga menempatkan Islam menjadi pihak yang sangat diperhitungkan dalam proses perubahan politik.

---

<sup>15</sup> *Ibid.*, 125.

<sup>16</sup> Bakhtiar Efendi, *Teologi Baru*, 61.

<sup>17</sup> *Ibid.*, 195.

Pemilu tahun 1999 partai politik Islam mengalami kekalahan. Padahal mayoritas penduduk Indonesia adalah muslim. Menurut Bakhtiar Efendi, inti permasalahan kekalahan partai politik Islam pada pemilu tahun 1999 terletak pada disertifikasi pemikiran dan praktek politik Islam, bahwa praktisi politik Islam telah menjual sesuatu yang tidak dibutuhkan publik. Para elite politik Islam telah bicara banyak tentang hal-hal, akan tetapi semua itu menyisakan satu hal ke mana arah politik Islam masih merupakan teka teki, bahkan para pemikir dan elite politik Islam memberi kejelasan yang justru yang berbeda-beda.<sup>18</sup>

Dengan demikian yang terpenting dipahami dari kekalahan partai-partai Islam sebenarnya tidak lebih sebagai akibat dari dangkalnya apa yang disebut Arkoun dengan estetika, penerimaan umat Islam terhadap gagasan Islam dalam bidang politik. Kadangkala itu nampak pada bentuk-bentuk artikulasi dan cenderung simbolik dalam berpolitik, kebanyakan partai-partai Islam yang ada merasa cukup jika sudah menggunakan label-label Islam, sedangkan untuk membangun soliditasnya di kalangan partai-partai Islam sudah merasa puas jika hanya mendasarkan pada sentimen nama yang sangat klasik seperti soal-soal yang berkaitan dengan Islam.

Dalam konteks itu, agama memang perlu membimbing tingkah laku dan moral politik. Islam, misalnya mengajarkan keadilan, yakni salah satu konsep sentral dalam Islam, selain tauhid yang merupakan konsep paling penting. Nilai

---

<sup>18</sup> *Ibid.*, 225.

Substantif keadilan, sebagaimana diajarkan Al-Qur'an seharusnya diekspresikan ke dalam program-program politik. Ada juga konsep *al-Musawa* (egalitarianisme, persamaan). Egalitarianisme ini secara substantif bisa menapasi platform partai-partai dan menjiwai konsep-konsep dan aktifitas politik.<sup>19</sup>

Dalam partai politik Islam Era Reformasi banyak muncul para kyai di panggung politik yang memiliki makna signifikan dalam proses transformasi politik. Munculnya kyai dalam konteks politik setidaknya terdapat lima catatan penting bagi masa depan politik Indonesia. *Pertama*, dinamika politik elite akan mewarnai kalangan elite Islam yang setidaknya secara normatif yang memiliki wawasan keagamaan yang luas. *Kedua*, Proses politisasi yang menempatkan mereka mampu menjadi elite politik yang juga menghendaki kyai, untuk mampu menjadi faktor peredam konflik secara dominan. *Ketiga*, mereka berpeluang untuk memperjuangkan aspirasi umat Islam. *Keempat*, kyai politik berkesempatan membangun citra positif untuk umat Islam. *Kelima*, kyai berkesempatan membangun kekuatan politik yang bermakna signifikan bagi keberlangsungan umat Islam di Indonesia yang sanggup mewarnai dinamika bangsa secara positif dan konstitutif.

---

<sup>19</sup> Azyumardi Azra, *Islam Substantif : Agar Umat Tidak Jadi Buih*, Penerbit Mizan Anggota IKAPI, Bandung, 138.



*Kedua*, lumpuhnya kekuatan Islam karena dikebiri Orde Lama pada masa demokrasi terpimpin merupakan hasutan dari PKI. Atas dua pemikiran tersebut, elite Islam beranggapan bahwa setelah naiknya Orde Baru iklim politik yang kondusif bagi pengembangan partai politik Islam.

Namun, kenyataannya tidaklah seperti yang diharapkan, karena pada pemerintahan Orde Baru politik Islam hanya dibatasi atau penyempitan partisipasi politik massa dengan pembatasan ruang gerak partai politik dan sebagian besar kelompok Islam justru mengedepankan artikulasi politik umat melalui jalur partai politik Islam. Maka, tak mengherankan jika usaha-usaha untuk merehabilitasi dan mendirikan partai-partai Islam itu mengalami benturan dengan pemerintah sehingga sebagian besar menemui kegagalan dan kebuntuhan.<sup>2</sup>

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang terbentuk tanggal 13 Februari 1973 dan merupakan peleburan dari partai-partai Islam (NU, PSII, Parmusi, dan Perti) adalah satu-satunya partai yang diproyeksikan sebagai partai Islam akan tetapi, setelah tahun 1983 terjadi keseragaman asas dan setelah dikeluarkannya UU No. 3 Tahun 1985 tentang kepartaian. Maka PPP mulai kehilangan ciri atau identitas sebagai satu-satunya wadah untuk mengartikulasikan kepentingan politik umat Islam.

Hilangnya partai politik Islam di Indonesia yang ditandai dengan penetapan Pancasila sebagai satu-satunya asas Partai Persatuan Pembangunan

---

<sup>2</sup> Aminuddin, *Kekuatan Islam dan Pergulatan Kekuasaan di Indonesia*, Pustaka Pelajar Yogyakarta, 1999, 1 – 3.

(PPP) dalam Muktamar yang pertama tahun 1984, menimbulkan tanda tanya besar mengenai bentuk aspirasi umat Islam dan wadah penyalurannya.

Salah satu pertanyaan mendasar yang menyangkut hubungan antara Islam dan politik adalah aspirasi politik Islam dapat disalurkan tanpa melalui partai Islam ?. Bagi umat Islam, persoalan penerimaan asas tidak hanya berhenti sampai di situ. Salah satu masalah terbesar adalah *Follow Up-nya* artinya, dengan tiadanya partai Islam saat ini melalui saluran atau wadah politik mana aspirasi politik Islam itu diartikulasikan ?. Dapatkan atau bersediakah ketiga partai politik yang ada menjadikan Islam sebagai salah satu tolak ukur segenap proses pengambilan keputusan politik ?. Di sinilah aspirasi Islam tidak bisa dilepaskan dari arti kebenarannya di tengah-tengah masyarakat yang sedang mengalami transformasi di berbagai segi kehidupan. Tetapi dengan pengembangan iklim politik yang lebih kondusif terhadap Islam.

Namun demikian harus diakui bahwa dengan timbulnya pola hubungan yang saling mengakomodasi, maka Islam memiliki akses terhadap kekuasaan, paling tidak kalangan Islam mempunyai peluang untuk menetralisasi sikap-sikap seperti yang terjadi sebelumnya yang mempunyai kecenderungan memojokkan Islam atau meminggirkan Islam yang selama dua dekade tersebut. Secara

---

<sup>3</sup> Tebba Sudirman, *Islam Orde Baru Perubahan Politik dan Keagamaan*, Cet. I – Yogyakarta : Tiara Wacana, 1993, 3.

struktural memang merupakan akibat dari adanya komplotan (konspirasi) dari kekuatan politik tertentu yang hendak mengucilkan Islam.

Keberadaan partai politik dalam negara dianggap sebagai salah satu institusi demokrasi. Karena fungsi partai politik adalah menyerap dan mengartikulasikan aspirasi dan kepentingan rakyat, sarana sosialisasi dan komunikasi politik dan media penyaluran perbedaan pendapat yang terjadi di masyarakat. Maka keberadaan partai politik menjadi faktor penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Untuk mewujutkan semua itu salah satunya dengan kekuasaan politik yaitu dengan jalan memperjuangkan dan mengimpletasikan nilai-nilai yang harus mempunyai posisi, yang merupakan kekuatan untuk memperjuangkan nilai-nilai dan aspirasi masyarakat yang didambakan. Adapun nilai-nilai tersebut adalah rakyat akan semakin terbuka untuk menyalurkan aspirasinya dan umat Islam diuntungkan karena partai politik yang kongkrit memperjuangkan aspirasinya.

Ada dua faktor yang menjadikan sebab lemahnya kedudukan kelompok muslim diawal Orde Baru : *Pertama*, persepsi politik yang bersifat ideologis. Pada masa tersebut pemikiran dan mayoritas umat Islam masih terpengaruh oleh garis panduan politik lama yang lebih “simbolik dan ideologis Islam”, yang partai Islam dianggap sebagai satu-satunya kendaraan untuk mencapai tujuan politik. Oleh karena itu “tenaga” mayoritas kelompok muslim dihabiskan demi partai politik. *Kedua*, kelemahan internal umat Islam sendiri bisa dilihat dari

<sup>4</sup> M. Rusli Karim., 125.

kurangnya jumlah sumberdaya manusia yang siap bersaing dengan kelompok lain, sempitnya wawasan pikiran para pemimpin organisasi Islam persaingan pengaruh dan tiadanya persatuan di antara partai-partai Islam dan organisasi-organisasi masyarakat (ormas) Islam.<sup>5</sup>

Dinamika umat Islam dalam hubungannya dengan negara Orde Baru pada awal dasawarsa 1970-an yang tetap diwarnai dengan ketegangan dan konfrontasi. Betapa banyak yang harus dibayar ketika umat Islam selama periode konfransi yang penerapan strategi pengedapan artikulasi “partai Islam” dan “oposisi” kurun waktu itu ternyata justru makin menempatkan umat Islam dipinggirkan papan percaturan politik orde baru. Indikasinya paling riil yaitu merosotnya posisi politik umat Islam bisa dilihat dari hampir tidak adanya jabatan strategis yang dipegang oleh tokoh-tokoh yang memiliki latar belakang “gerakan Islam”. Sementara konsep-konsep kebijakan yang dihasilkan negara juga banyak yang tidak mengakomodasikan aspirasi kaum muslimin.<sup>6</sup>

Kehadiran politik umat Islam dalam formatnya yang sekarang ini merupakan konsekwensi dari perubahan konfigurasi politik nasional, dimana pemerintah, khususnya presiden Soeharto menganggap perlu untuk mengakomodasi Islam, karena Islam merupakan sebuah kekuatan yang riil. Sementara itu, sarana umat Islam untuk mengartikulasi bisa dibilang sangat terbatas. Tidak ada media massa Islam yang representatif untuk menyampaikan

<sup>5</sup> M. Rusli Karim., 239 – 240.

<sup>6</sup> Aminuddin., 141 – 142.

aspirasi dan ide politik Islam. Apalagi kalau dibandingkan dengan kelompok non Islam yang merupakan raksasa produk Orde Baru dalam bidang media masa.

Golongan Karya (Golkar) yang lebih besar kemunculannya untuk mendekati “sayap Islam” harus lebih tegas mengakui potensi besar umat Islam dengan segala resiko yang mengiringinya dan tidak sekedar untuk kepentingan taktis politis pada saat memerlukan dukungan umat Islam.

Dalam hal ini yang mampu untuk mewadai sekaligus untuk menjadi corong aspirasi umat Islam adalah Golkar. Sebab dengan kebesarannya sekaligus sebagai “*single majority*” Golkar dapat berkehendak lebih banyak meskipun Golongan Karya bukan partai agama, akan tetapi melihat apa yang dilihat apa selama ini merasa jauh berbeda. Nuansa-nuansa Islam kian nampak di dirinya, seperti dalam lembaga tinggi negara, MPR, Golkar pun memiliki wakil-wakil dari golongan ulama<sup>7</sup> dan cendekiawan muslim. Dengan demikian, Golkar telah benar-benar memperjuangkan aspirasi Islam.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

## B. PERAN DAN KEDUDUKAN PARTAI ISLAM ERA REFORMASI

Kemunculan partai-partai Islam di era reformasi mendapat suatu pandangan yang mengkuwatirkan dari sejumlah kalangan akan kembalinya politik Islam ke format awal yang dapat membuka peluang yang digunakannya idiom-idiom dan simbol Islam untuk memperoleh dukungan. Kekuwatiran itu didasari

<sup>7</sup> Affan Ghaffar, *Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi*, Pustaka Pelajar Yogyakarta, 1999, 133.

oleh pertimbangan teologis keagamaan, sebab digunakannya asas atau simbol Islam yang merupakan bagian dari pemahaman tentang demokrasi dan belum tentu partai Islam itu merupakan ekspresi politik atau ideologi yang sektarian dan eksklusif, selain itu juga menghormati masyarakat politik Indonesia. Akan kebutuhan pluralisme ciri dan identitas politik.<sup>8</sup>

Sehubungan dengan itu umat Islam meyakini bahwa Islam juga mengatur tentang politik dalam suatu negara. Dalam hal ini oleh umat Islam di Indonesia mewujudkan dengan ikut berperan dalam kekuasaan negara sesuai dengan tujuan syariat Islam. Partai politik merupakan sarana untuk bisa mempengaruhi kebijakan suatu negara yang diaktualisasikan secara formalisme, artinya yaitu dengan partai bernama Islam, lambang partai yang menunjukkan Islam, dasar partai berasas Islam dan tuntutan kembali berlakunya syariat Islam yang tercantum dengan tujuh kata dalam Piagam Jakarta. Pemahaman politik Islam formalisme berlangsung hingga awal Orde Baru dengan pemerintah yang diwakili oleh pihak nasionalis tidak berjalan harmonis.

Adapun faktor yang mempengaruhi politik Islam tidak bisa berhasil secara maksimal disebabkan adanya faktor ketidak siapan para pemimpin Islam untuk menciptakan manuver-manuver politik yang meyakinkan semua pihak bahwa gagasan ideologi Islam merupakan suatu kebutuhan bukan hanya suatu kewajiban, adanya faktor pihak penjajah yang lebih mempersiapkan kalangan nasionalis sekuler untuk menyongsong kemerdekaan Indonesia, para aktifis dan

---

<sup>8</sup> Bakhtiar Efendi, *Repolitisasi Politik*, Mizan Anggota IKAPI Bandung 2000, 58 – 59.

pemikir Islam belum bisa memberikan konsep politik. Hal itu disebabkan para aktifis dan pemikir Islam masih memandang paham intergalistik.

Kelemahan tersebut disadari oleh para aktifis dan pemikir Islam, sehingga mereka merubah gerakan politik Islam yang tidak secara formalis lagi, tapi secara substansi. Mereka memandang bahwa politik Islam hanya memberikan prinsip-prinsip dan tata nilai bagi kehidupan bernegara dan berpolitik. Islam tidak memberikan konsep yang baku tentang sistem politik dalam negara dan prinsip-prinsip politik Islam itu hanya menjadi etika bagi umat Islam dalam kehidupan politik dan demi terwujudnya demokrasi.

Perubahan pemahaman dari formalis dari ke substansif disebabkan adanya faktor pengaruh dari kebangkitan kemurnian ajaran Islam dari pengaruh ajaran westernisasi Barat di Mesir, kebangkitan di Mesir dimotori oleh Abduh dan Jamaluddin al-Afghani. Juga adanya jargon Nur Kholis Madjid “ Isiam Yes, Partai Islam No”, sebuah jargon yang mendorong umat manusia untuk mengerahkan komitmennya kepada nilai-niali Islam bukan pada label-label Islam. Faktor lain adanya pemahaman Islam kultur yang dimotori oleh para pemikir Islam Indonesia seperti Amin Rais dan Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dan lain-lain. Dan adanya politik yang mengambang dari pemerintahan sehingga umat Islam perlu merubah garis perjuangan.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Azyumardi Azra, *Islam Substansif : Agar Umat Islam Tidak Jadi Buih*, Penerbit Mizan Anggota IKAPI Bandung, 2000, 149.

Perubahan itu menjadikan untuk mewujudkan cita-cita politik Islam yang tidak harus melalui jalur struktural, tetapi bisa dengan jalur kultural. Jalur kultural ini, politik Islam lebih bisa disosialisasikan dari pada dengan jalur struktural. Karena kondisi bangsa Indonesia saat ini berada pada hegemonik politik pemerintah Orde Baru. Sehingga jalur strukturak umat Islam dapat berperan dengan maksimal pada masyarakat atau masa pembelajaran demokrasi terhadap masyarakat.

Sehubungan dengan perjalanan partai Islam dalam sejarah Indonesia, partai Islam tidak seberuntung partai yang non Islam. Untuk waktu yang cukup lama pemerintah memandang partai Islam sebagai pesaing politik utama yang mengganggu landasan ideologi negara. Karena itu pemerintah berupaya melemahkan dan menjinakkan dengan difusikan partai Islam dalam satu partai dan diberlakukannya asas tunggal (Pancasila).<sup>10</sup>

Namun dalam kondisi itu berubah setelah jatuhnya Soeharto. 21 Mei 1998, kondisi politik secara keseluruhan relatif mencair, ketika liberalisasi dan relaksasi politik menjadi ciri utamanya. Dengan kondisi hampir semua kekuatan politik berada pada posisi yang sebanding dan egaliter yang merasa mempunyai hak untuk mengartikulasikan kepentingan politiknya.

Hal ini sebagaimana yang diungkapkan Azyumardi Azra, bahwa kemunculan banyak partai disebabkan oleh persoalan *khilafiyah* atau *furu'iyah*,

---

<sup>10</sup> Bahktiar Efendi, *Repolitikasi Islam*, 206.

itu bisa dilihat dengan adanya partai-partai politik dari kalangan Islam tradisional dan dari kalangan Islam modernis reformis.<sup>11</sup>

Partai-partai politik Islam dalam pemilu 1999 baik secara formalis maupun substansif belum bisa menarik masyarakat Indonesia yang mayoritas memeluk Islam. Sehingga pada pemilu 1999 partai-partai Islam mengalami kekalahan. Menurut Bakhtiar Efendi partai Islam mengalami kekalahan itu dikarenakan para pemikir dan aktifis partai politik Islam tidak mampu memberikan arah yang jelas terhadap politik Islam baik dalam bentuk pemikiran maupun praktek politik Islam.<sup>12</sup>

Menurut Hamzah Haz, kekalahan partai-partai politik Islam pada pemilu 1999 dikarenakan umat Islam memahami agama sebatas persoalan ibadah ritual dan terpengaruh adanya paman sekularisme. Sedangkan dalam diri partai-partai politik Islam belum mampu menunjukkan fikrah atau ide yang menunjukkan Islamnya dalam mengurus umat. Melihat faktor kekalahan partai politik Islam menggambarkan bahwa umat Islam di Indonesia belum paham betul akan hakikat ajaran Islam tentang politik. Karena umat Islam di Indonesia sudah merasa puas dengan penggunaan label dan idiom-idiom serta simbol-simbol agama dalam politik. Tetapi konsep *amal makruf nahi munkar* yang merupakan substansi nilai-nilai ajaran Islam kurang diperhatikan. Fenomena seperti itu dapat diperhatikan dengan masuknya para pemimpin organisasi keagamaan dan elite politik atau kyai

<sup>11</sup> Azyumardi Azra, 175.

<sup>12</sup> Bakhtiar Efendi, *Teologi Baru Politik Islam di Indonesia*, 61.

dalam jabatan pemerintah, baik di eksekutif maupun yudikatif. Tindakan politik mereka kurang mencerminkan seorang umat Islam yang menjadi panutan.

Politik Islam di Indonesia dalam arti formalisme tidak laku, masyarakat umumnya lebih memilih yang substansif. Jadi, apabila Islam mau berperan dalam politik, perannya adalah peran substansif dan mengembangkan pesan-pesan moral dan tema-tema sentral seperti keadilan dan egalitarianisme, bukan menonjolkan simbol. Tema sentral itu kurang mendapat perhatian karena politik masih mengembangkan kultur politik tradisional, yang tidak egaliter tetapi cenderung feodalistis.<sup>13</sup>

### C. KOMPARASI PERAN DAN KEDUDUKAN PARTAI ISLAM MASA ORDE BARU DAN ERA REFORMASI.

Keterbukaan dalam kancah politik di Indonesia yang mengalami pasang surut perpolitikan dan ada kekalahan, keberhasilan dalam berpolitik. Namun harus kita catat bahwa peran dan kedudukan partai politik Islam masa Orde Baru dan Reformasi tidak jauh beda, sebab dari kedua-duanya politik Islam hanya diurutan bawah dari partai politik non Islam, adapun masa Orde Baru peran politik Islam hanya dibatasi atau penyempitan partai Islam. Partai politik Islam mengalami benturan dengan pemerintah, sehingga sebagian besar partai politik Islam menemui kegagalan dan satu-satunya partai Islam yang menjadi wadah

<sup>13</sup> Azyumardi Azra., 145.

aspirasi umat Islam yaitu Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Walaupun pada hakikatnya, umat Islam tidak seluruhnya berafiliasi dengan PPP. Namun mengeneralisasikan umat Islam berada dalam irama dan nuansa politik yang sama. Pandangan yang kurang mendapatkan kebijakan historis yang kokoh.

Adanya kecenderungan dari umat Islam yang aktif diluar pentas politik, semata-mata hanya mencari saluran yang lebih efektif, walaupun saluran yang ada tersebut tidak seefektif melalui jalur legislatif. Perjuangan umat Islam lebih memperjuangkan gerakan elite dari pada gerakan politik yang melakukan pressure terhadap kekuasaan. PPP yang berfungsi seperti pada era 70-an sampai dekade 80-an tidak mampu lagi menciptakan citra sebagai wadah penyaluran aspirasi politik umat Islam. Karena Faktor-faktor internal dalam dirinya, juga dikarenakan desakan-desakan eksternal yang sulit dihindari. Ada juga anggapan yang relatif sama dikalangan umat Islam, bahwa hubungan akomodatif pada saat itu adalah sebuah kondisi yang dibutuhkan untuk mencapai target-target politik di masa depan.

Namun demikian, harus diakui dengan timbulnya pola hubungan yang saling mengakomodasi, maka Islam memiliki akses terhadap kekuasaan, paling tidak kalangan Islam mempunyai kebijakan-kebijakan yang selama Orde Baru politik umat Islam cenderung dipinggirkan dari perpolitikan.<sup>14</sup> Sedangkan partai politik Islam masa Orde Baru yang mengalami lemahnya kedudukan, kelompok

---

<sup>14</sup> M. Rusli Karim., 242 – 243.

muslim di karenakan persepsi politik yang bersifat ideologis dan sempitnya wawasan pikiran para pemimpin organisasi Islam. Yang mengakibatkan kekuatan Islam dalam regulasi politik bisa dipinggirkan oleh rezim Orde Baru.<sup>15</sup>

Runtuhnya rezim Soeharto pada tanggal 21 Mei 1998, Indonesia memasuki fase liberalisasi politik yang ditandai serba ketidakpastian pada fase liberalisasi politik yang ditandai dengan terjadinya redefinisi hak-hak politik rakyat. Dalam kerangka itu terjadilah luapan kebebasan kehidupan politik dengan ditandai oleh naiknya kebebasan. Sebagaimana suasana dan tuntutan umum ditengah masyarakat, peran partai Islam masa Era Reformasi ini banyaknya para tokoh-tokoh elite politik mendirikan partai Islam yang mengalami ledakan yang sangat drastis, diantara 123 partai politik telah terbentuk hingga Minggu ketiga Desember 1998, ada hampir 20 partai politik yang memakai label Islam.<sup>16</sup>

Ledakan partisipasi di kalangan Islam juga terjadi dalam bentuk-bentuk yang tidak permanen. Semacam pembentukan partai, yakni dalam bentuk forum atau insidental. Munculnya partai Islam dalam Era Reformasi yaitu kembalinya format politik Islam yang dapat membuka peluang bagi kalangan Islam untuk menyuarakan aspirasinya. Walaupun pada dasarnya peran partai Islam untuk menjadi aspirasi masyarakat (Islam).

---

<sup>15</sup> *Ibid.*, 240.

<sup>16</sup> Eep Saefullah Fatah, *Memuntaskan Perubahan I : Catatan Politik 1998 - 1999*. Penerbit Mizan Bandung, 2000, 154.

Dalam kerangka itu kedudukan partai Islam di Era Reformasi mengalami kekalahan dengan partai politik non Islam. Partai politik Islam yang mengalami kekalahan itu disebabkan adanya umat Islam hanya memahami agama sebatas persoalan ibadah ritual, dan terpengaruh adanya paham sekularisme. Sedangkan dalam diri partai politik Islam belum mampu menunjukkan pro-aktif Islamnya, melihat faktor kekalahan partai Islam itu. Bahwa umat Islam di Indonesia belum paham betul akan hakikat ajaran Islam tentang politik.

Oleh karenanya dibutuhkan kerangka operasional partisipasi aktif umat Islam dalam politik yang didukung oleh potensi umat Islam yang sesungguhnya. Untuk itu umat Islam perlu menyusun strategi ganda. *Pertama*, strategi jangka pendek, umat Islam harus mampu mencari tempat afiliasi yang banyak menawarkan program yang mampu menompang khasanah masyarakat Islam. *Kedua*, strategi jangka panjang berupa penyiapan kerangka politik secara pragmatik dengan bertitik tolak dari kegiatan budaya politik Indonesia.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> M. Rusli Karim., 28 – 29.

## BAB V

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

Dari berbagai permasalahan telah diuraikan bab-ba sebelumnya, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Meski umat Islam Indonesia sebagai kelompok Islam mayoritas, nyatanya pada masa Orde Baru umat Islam tidak bisa maksimal menyuarakan aspirasinya secara politik.
2. Partai politik Islam pada pemilu 1999 dengan segala potensi yang relatif minim dan harus menghadapi tantangan yang tidak ringan, partai politik Islam yang jumlahnya relatif banyak, sedangkan massa pemilih sangat kecil. Dan bentuk partisipasi umat Islam disalurkan melalui partai Islam dan partai non Islam.
3. Perasamaan dan perbedaan partai Islam masa Orde Baru dan Era Reformasi tidaklah jauh beda, karena sama-sama mengartikulasikan partai politik Islam ke dalam kancah perpolitikan. Sedangkan dalam perbedaan partisipasi partai politik Islam hanya sedikit, kalau pada waktu Orde Baru partai Islam hanya dikebiri dan penyempitan ruang gerak untuk berpolitik. Sedangkan masa era reformasi, ledakan partisipasi politik Islam dan bermuncunya banyak partai Islam dan kembalinya format politik yang selama itu (Orde Baru) dipersempit

untuk berpolitik. Dan peran politiknya dilokalisir sedemikian sempit sehingga digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id dimarjinalkan secara politik maupun secara ekonomi.

## **B. SARAN-SARAN.**

Dengan selesainya skripsi ini, mudah-mudahan bisa dijadikan bahan pemikiran tambahan, sekurang-kurangnya bagi perkembangan dunia akademisi dan selebihnya bagi para pemikir politik Islam di Indonesia. Dengan bermunculan partai-partai Islam sekarang ini, umat Islam di bingungkan dengan banyaknya partai-partai politik. Maka harus mempunyai sebuah format partisipasi politik supaya masyarakat bisa membedakan partai politik yang mempunyai landasan pemikiran yang jernih.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Aminuddin, *Kekuatan Islam dan Pergulatan Kekuasaan di Indonesia*, Pustaka Pelajar  
Yogyakarta, 1999.

Azra, Azyumardi., *Islam Subtansif : Agar Umat Tidak Jadi Buih*, Mizan Bandung,  
2000.

Anwar, M, Syafi'i, *Pemikiran dan Aksi Islam Indonesia Sebuah Kajian Politik  
Muslim Orde Baru*, Yayasan Paramadina, Jakarta, 1995.

Dekdibud, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka. Tt.

Effendi, Bakhtiar., *(Re) Politisasi Islam : Pernahkah Islam Berhenti Berpolitik ?*,  
Mizan Bandung, 2000.

-----., *Teologi Baru Islam*, Yogyakarta, Babnu Press, 2001.

Fattah, Eep Saefuliah., *Menuntaskan Perubahan : Catatan Politik 1998 - 1999*,  
Mizan Bandung 2000.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Ghafar, Affan., *Politik Indonesia : Transisi Menuju Demokrasi*, Pustaka Pelajar,  
Yogyakarta, 1999.

Hassan, L. Sahar., *Memilih Partai Islam, Visi, Misi dan Persepsi*, Jakarta Gema  
Insani Press, 1998.

Karim, M. Rusli., *Negara dan Peminggiran Islam Politik*, Tiara Wacana Yogyakarta,  
1999.

Ma'arif, A. Syafi'i., *Islam Kekuatan Doktrin dan Keagamaan Umat; Pustaka Pelajar*,  
1997.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

- Mulkhan, Abd. Munir., *Runtuhnya Mitos politik Santri, Strategi Kebudayaan Dalam Islam*, Siperss, 1994.
- ., *Perubahan Perilaku Politik dan Polarisasi Umat Islam 1965 - 1987 Dalam Perspektif Sosiologis*, Rajawali Press, 1989.
- Mu'nim, Abdul., *Islam di Tengah Arus Transisi*, Jakarta, 2000.
- Marbun. B. N., *Kamus Politik*, - Cet. I - Pustaka sinar Harapan Jakarta, 1996.
- Poerwadarminto, WJS., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, 1993.
- Rahardja, M. Dawam., *Intelektual Intelegensia dan Perilaku Politik Bangsa*, Mizan Bandung, 1993.
- Sanit, Arbi., *Partai Pemilu dan Demokrasi*, Pustaka Pelajar, 1997.
- Subhan, Arif., *Indonesia Dalam Transisi Menuju Demokrasi Lembaga Studi Agama dan Filsafat (LSAF)*, 1999.
- Tobha, Abd. Azis., *Islam dan Negara Dalam Politik Orde Baru*, Gema Insani Press, 1996.
- Tebba, Sudirman., *Islam Orde Baru : Perubahan Politik dan Keagamaan*, Tiara Wacana Yogyakarta, 1993.
- Zahar, Abu., *Politik demi Tuhan Nasionalisme Religius di Indonesia*, Pustaka Hidayah Bandung, 1999.